

**STRATEGI PENGAWASAN DINAS BINA MARGA DAN BINA
KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG DALAM MENINGKATKAN
KUALITAS KONSTRUKSI JALAN
(Studi Pada Jalan Provinsi di Kota Metro)**

(Skripsi)

Oleh

**ARDINA PUTRI
NPM. 2216021040**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

STRATEGI PENGAWASAN DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KONSTRUKSI JALAN (Studi Pada Jalan Provinsi di Kota Metro)

Oleh

ARDINA PUTRI

Kondisi infrastruktur jalan di Provinsi Lampung masih menghadapi tantangan kualitas konstruksi. Pada 2024, 17,90% dari 1.695,479 km ruas jalan provinsi rusak berat, termasuk Jalan Patimura di Kota Metro yang mengalami kerusakan sedang 8,53% meskipun telah diperbaiki sebelumnya. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan strategi pengawasan konstruksi dan pemeliharaan jalan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian didasarkan pada teori strategi pengawasan menurut Simbolon (2004), yang mencakup pengawasan langsung (*direct supervision*) serta pengawasan tidak langsung (*indirect supervision*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan telah berjalan sesuai dengan ketentuan Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2023. Pengawasan langsung cukup efektif dalam memantau kondisi lapangan, meskipun percepatan tindak lanjut masih diperlukan agar perbaikan dapat segera dirasakan masyarakat. Sementara itu, pengawasan tidak langsung sudah terlaksana melalui sistem pelaporan dan evaluasi administratif, namun masih menghadapi kendala keterlambatan penyampaian laporan serta keterbatasan pemahaman mekanisme pengawasan oleh BUJK dan BURP. Sebagai rekomendasi, penggunaan sistem pelaporan administrasi digital diusulkan untuk mempermudah pengumpulan data, mempercepat tindak lanjut temuan, serta meningkatkan koordinasi antar pihak terkait. Dengan demikian, strategi pengawasan yang terarah dapat lebih optimal dalam mendukung peningkatan kualitas jalan dan penerapan prinsip *good governance* di Provinsi Lampung.

Kata Kunci: Strategi Pengawasan, Pengawasan Konstruksi, Konstruksi Jalan, *Good Governance*.

ABSTRACT

SUPERVISION STRATEGY OF THE LAMPUNG PROVINCE'S DEPARTMENT OF HIGHWAYS AND CONSTRUCTION IN IMPROVING ROAD CONSTRUCTION QUALITY (Study of Provincial Roads in Metro City)

By

ARDINA PUTRI

Road infrastructure in Lampung Province continues to face construction quality challenges. In 2024, 17.90% of the 1,695,479 km of provincial roads were severely damaged, including Jalan Patimura in Metro City, which suffered moderate damage at 8.53% despite previous repairs. This indicates the need to strengthen road construction and maintenance oversight strategies. This study used a qualitative descriptive method with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results are based on Simbolon's (2004) theory of oversight strategies, which encompasses direct and indirect supervision. The results indicate that oversight has been carried out in accordance with the provisions of PUPR Ministerial Regulation No. 1 of 2023. Direct oversight is quite effective in monitoring field conditions, although accelerated follow-up is still needed so that improvements can be felt immediately by the community. Meanwhile, indirect oversight has been implemented through an administrative reporting and evaluation system, but still faces obstacles such as late report submissions and limited understanding of the oversight mechanism by BUJK and BURP. As a recommendation, the use of a digital administrative reporting system is proposed to facilitate data collection, accelerate follow-up on findings, and improve coordination between relevant parties. Thus, a targeted monitoring strategy can be more optimal in supporting the improvement of road quality and the implementation of good governance principles in Lampung Province.

Keywords: Supervision Strategy, Construction Supervision, Road Construction, Good Governance

**STRATEGI PENGAWASAN DINAS BINA MARGA DAN BINA
KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG DALAM MENINGKATKAN
KUALITAS KONSTRUKSI JALAN
(Studi Pada Jalan Provinsi di Kota Metro)**

Oleh

ARDINA PUTRI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **STRATEGI PENGAWASAN DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KONSTRUKSI JALAN (Studi Pada Jalan Provinsi di Kota Metro)**

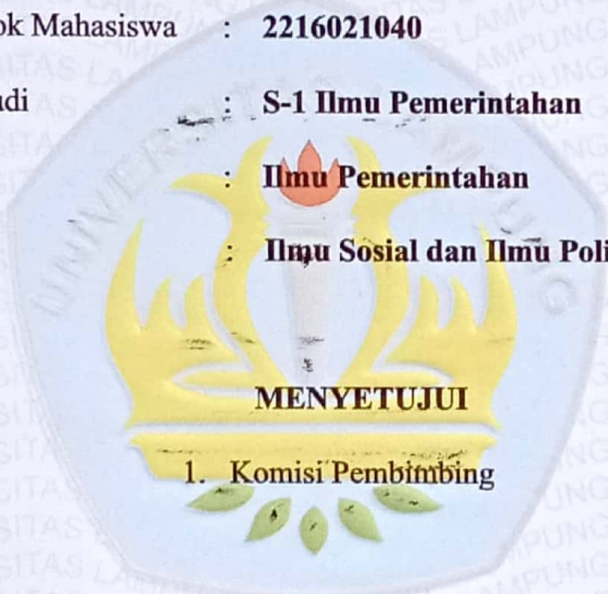
Nama Mahasiswa : **Ardina Putri**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2216021040**

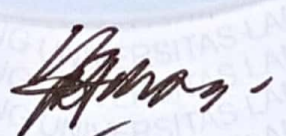
Program Studi : **S-1 Ilmu Pemerintahan**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

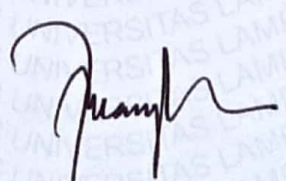
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P.
NIP 196112181989021001

2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**


Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si.
NIP 197106042003122001

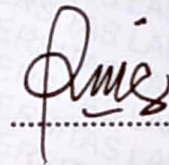
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P.**



Penguji : **Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **30 Januari 2026**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 22 Januari 2026
Yang Membuat Pernyataan



Ardina Putri
NPM. 2216021040

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ardina Putri lahir di Metro, 19 Desember 2003. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari Bapak Dedy Virmansyah dan Ibu Liana dan memiliki satu kakak bernama Alde Sanggono Djati. Penulis memulai jenjang pendidikan dari bangku Taman Kanak-Kanak (TK) Kartika pada tahun 2009. Penulis melanjutkan Sekolah Dasar di SDN 1 Metro Pusat dari tahun 2010-2016. Jenjang

Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Metro dari tahun 2016-2019. Kemudian Sekolah Menengah Atas di SMAN 3 Metro dari tahun 2019-2022. Penulis selanjutnya menempuh jenjang pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung pada tahun 2022 dengan tercatat sebagai mahasiswi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama masa kuliah, penulis mengikuti berbagai kegiatan baik akademis maupun non akademik. Penulis bergabung pada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung pada tahun 2023. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2025 di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara. Selain itu, Penulis juga mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al Baqarah: 286)

"Mendung hari ini bukan berarti hujan selamanya, jangan pernah menyerah"

(Anonim)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamiin.

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga. Engkau telah meridhai setiap langkah hambamu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Shalawat teriring salam kepada Nabi Muhammad SAW semoga kelak skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat.

Dengan ketulusan dan kerendahan hati, Kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

Ayah dan Bunda tercinta

Dedy Virmansyah, SH. dan Liana

Serta untuk kakak ku tersayang

Alde Sanggono Djati

Terima kasih yang tak terhingga atas dukungan serta pengorbanan yang telah diberikan dalam setiap langkah ku dan terima kasih atas doa dan kasih sayang yang selalu dicurahkan tiada hentinya.

Terimakasih untuk seluruh dosen, staff dan teman-teman seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan

Almamaterku Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah puji syukur peneliti haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Strategi Pengawasan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dalam Meningkatkan Kualitas Konstruksi Jalan (Studi Pada Jalan Provinsi di Kota Metro)”. Tak lupa Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kita semua.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang penulis miliki. Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Suatu kebanggaan bagi penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., L.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Anna Gustiana Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.I.P, M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Tabah Maryanah selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan. Terima kasih bu atas Kepedulian dan masukannya kepada penulis semasa perkuliahan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan serta membalas segala kebaikan ibu.
7. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P., selaku Dosen Pembimbing Utama yang senantiasa meluangkan waktu dan ilmunya serta memberi bimbingan, kritik, saran dan masukannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan serta membalas segala kebaikan bapak.
8. Ibu Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si., selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan saran dan kritik serta masukan sehingga dapat membangun skripsi ini menjadi lebih baik. Terima kasih sebanyak-banyaknya, semoga ibu selalu sehat dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT.
9. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Penulis kepada bapak dan ibu semua. Terima kasih atas dedikasi yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada Penulis, sehingga Penulis bisa sampai ke posisi saat ini. Terima kasih atas segala ilmu yang Bapak dan Ibu berikan.
10. Kepada seluruh pihak yang telah berkenan meluangkan waktu untuk berbagi wawasan dan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada Bapak dan Ibu di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu atas segala bantuan, arahan, serta dukungan yang telah diberikan selama proses penelitian ini. Semoga segala kebaikan dan ketulusan Bapak dan Ibu mendapatkan balasan yang berlimpah.

11. Teristimewa untuk Ayah dan Bunda tercinta sumber kasih tanpa batas, doa tanpa henti, dan rumah paling tenang dalam setiap langkahku. Terima kasih telah menjadi pelukan hangat saat aku rapuh, alasan terkuatku untuk terus bertahan dan sosok yang selalu mengusahakan segalanya demi kebahagiaanku. Sebagai anak bungsu, mungkin aku tak selalu sempurna, tapi setiap usahaku hanyalah untuk membahagiakan kalian. Semoga karya kecil ini bisa membuat kalian bangga, meski tak pernah sebanding dengan cinta dan pengorbanan kalian selama ini.
12. Tak lupa, rasa terima kasih yang begitu besar aku sampaikan untuk kakakku tercinta. Terima kasih telah menjadi teman berbagi tawa, pelipur lara, sekaligus penyemangat di saat aku merasa lelah dan ingin menyerah. Terima kasih atas canda tawa sederhana yang membuat hari-hari penuh tekanan ini menjadi lebih ringan, serta atas doa, perhatian, dan pengertian yang membuat aku merasa tak pernah sendiri dalam perjalanan panjang ini.
13. Terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada Pakde Dwi Cahya Adi, S.H. (Pakde Iit), Bude Betty Manulang, Tante Devi Widiastuti, S.H. (Tante Upik) dan Linda Sri Nurta (Sep) atas segala dukungan, kasih sayang, serta perhatian yang tiada henti selama masa perkuliahan ini. Terima kasih telah menjadi sumber semangat, selalu menguatkan di saat aku terpuruk, dan dengan tulus membantu dalam setiap kesulitan yang kuhadapi. Doa dan dukungan kalian berarti lebih dari yang bisa diungkapkan dengan kata-kata.
14. Untuk sahabat-sahabatku tercinta Dhea Elsyia Fanira, Rora Widiarul ZB, Nazma Aiulia Al-Izzati, dan Dina Sauliana Sartika, terima kasih telah menjadi bagian berharga dalam setiap langkahku. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan waktu yang selalu kalian luangkan untuk mendengarkan setiap keluh kesahku tanpa lelah. Kalian selalu hadir sebagai tempat bersandar, penguat di saat aku rapuh, dan teman sejati dalam suka maupun duka. Persahabatan kita mungkin penuh lika-liku, tapi justru di sanalah keindahannya. Semoga kebaikan dan kebahagiaan selalu menyertai langkah kalian, dan kebersamaan ini tak berhenti di meja sidang, melainkan terus hidup dalam perjalanan kita selanjutnya.

15. Untuk sahabat-sahabat Archecha tersayang Arfi Laila Putri, Salma Hairunisa, Febi Juana, Dinda Ratna Oktalia, Reva Egista, dan Fina Audina, terima kasih telah mewarnai perjalanan ini dengan tawa, dukungan, dan kebersamaan yang tulus. Kalian bukan hanya teman seperjuangan, tapi juga keluarga yang selalu ada di setiap langkah, dalam senyum maupun air mata. Terima kasih sudah menjadi tempatku bercerita, menguatkan ku di saat aku hampir menyerah, dan mengingatkan ku untuk tetap berjalan ketika jalan terasa berat. Perjalanan ini tak akan sama tanpa kalian. Semoga persahabatan kita terus tumbuh, melampaui batas waktu dan jarak, hingga nanti kita bisa mengenang masa ini dengan senyum penuh syukur.
16. Teman-teman KKN desa Negeri Sakti Kecamatan Sungkai Utara, penulis mengucapkan terimakasih atas pengalaman dalam bentuk kerjasama di setiap program kerjanya yaitu kepada Intan Zavira, Kholda Nur Falahi, Femila Aprilia, Bagus Kurniawan, Bagus Fathal, Muhammad Iqbal.
17. Kepada sahabat MBKM tercinta, Rona Margareta Purba, terima kasih atas setiap momen seru dan berkesan selama magang. Dukungan dan kebersamaanmu menjadi bagian penting dalam proses belajar dan perjalanan ini. Semoga kita terus tumbuh dan saling menginspirasi ke depannya. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Rheynaia Ainul Nur R., Reysita Yaza, dan Fadilla Putri atas kerja sama, bantuan, serta kebersamaan yang hangat selama kegiatan magang di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kemudahan, dan keberkahan dalam setiap langkah kita ke depan.
18. Kepada seseorang yang tidak bisa penulis sebut namanya, terima kasih sudah hadir selama perjalanan ini. Kehadiranmu membawa semangat dan warna di setiap langkahku. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kesabaran yang kamu berikan selama ini. Semoga apa pun arah langkah kita nanti, semuanya jadi bagian indah dari cerita yang pernah kita tulis bersama.
19. Almamaterku tercinta beserta seluruh mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung Angkatan 2022 “*Viva Governancia*”.

20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan.
21. Terakhir, Kepada diriku sendiri, Ardina Putri. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang diisi air mata tanpa suara, dan pagi-pagi yang tetap kamu sambut dengan senyum meski hati belum benar-benar pulih. Terima kasih sudah memilih untuk terus melangkah, bahkan ketika dunia terasa berat dan langkah terasa goyah. Karya ini kupersembahkan sebagai tanda hormat untuk semua perjuangan yang tak terlihat, untuk lelah yang tak pernah diucap, dan untuk keberanian yang perlahan tumbuh di antara luka. Terima kasih sudah setia menemani dirimu sendiri, memeluk ragu, dan mengubahnya menjadi keyakinan. Semoga kamu tak pernah lupa bahwa kamu cukup, kamu kuat, dan kamu pantas mendapatkan segala hal baik yang kamu perjuangkan

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi selama proses penyusunan skripsi ini. Meskipun tidak dapat disebutkan satu per satu, setiap doa dan perhatian yang diberikan memiliki arti yang sangat mendalam. Segala kebaikan tersebut menjadi bagian penting dari perjalanan ini. Semoga Allah SWT membalas dengan limpahan rahmat dan kebahagiaan untuk kita semua. Penulis menyadari karya ini masih jauh dari sempurna, namun semoga skripsi sederhana ini dapat memberi manfaat dan menjadi langkah kecil yang berarti

Bandar Lampung, Februari 2026

Penulis

Ardina Putri

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xx
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Kebijakan Publik.....	14
2.2 Strategi dan Pengawasan.....	18
2.3 Good Governance	25
2.4 Kerangka Pikir	28
III. METODE PENELITIAN	31
3.1 Tipe Penelitian	31
3.2 Lokasi Penelitian.....	32
3.3 Fokus Penelitian.....	32
3.4 Jenis Data	35
3.5 Informan Penelitian.....	36
3.6 Teknik Pengumpulan Data	37
3.7 Teknik Pengolahan Data	39
3.8 Teknik Analisis Data.....	40
3.9 Teknik Kebasahan Data	41

IV. GAMBARAN UMUM.....	43
4.1 Gambaran Umum Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.....	43
4.1.1 Sejarah Singkat	43
4.1.2 Visi dan Misi.....	44
4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	45
4.1.4 Susunan dan Struktur Organisasi	46
4.2 Gambaran Umum Ruas-Ruas Jalan di Provinsi Lampung.	49
V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54
5.1 Strategi Pengawasan Langsung (<i>direct supervision</i>)	54
5.1.1 Pemantauan lapangan secara berkala	55
5.1.2 Pemeriksaan kesesuaian hasil pekerjaan	75
5.2 Pengawasan Tidak Langsung (<i>Indirect Supervision</i>).....	82
5.2.1 Pemeriksaan administrasi kontrak dan dokumen pelaksanaan	83
5.2.2 Tindak lanjut atas temuan ketidaksesuaian pekerjaan.....	101
VI. SIMPULAN DAN SARAN	107
6.1 Simpulan.....	107
6.2 Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN	115

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Kondisi Ruas Jalan Provinsi Periode 2018-2024.....	4
Tabel 2. Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 3. Informasi Penelitian	36
Tabel 4. Ruas-Ruas Jalan Provinsi Lampung.....	51
Tabel 5. Dokumen-Dokumen Administrasi Yang Dikumpulkan.....	88
Tabel 6. (20 Paket) Pengawasan Tertib Usaha Jasa Konstruksi.....	90
Tabel 7. Pengawasan Badan Usaha Rantai Pasok Metrial Konstruksi	91
Tabel 8. (20 Paket) Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	92
Tabel 9. (20 Bangunan) Pengawasan Tertib Pemanfaatan Produk	93
Tabel 10. Daftar Petugas Pengawas Bidang Bina Konstruksi.....	95

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Peta Ruas Jalan Provinsi Lampung	2
Gambar 2. Grafik Kondisi Ruas Jalan Provinsi Lampung Periode 2018-2024.....	4
Gambar 3. Kerangka Berfikir	30
Gambar 4. Struktur Organisasi	48
Gambar 5. Dokumentasi Pengawasan Konsultan Supervisi	61
Gambar 6. Pengawasan Lapangan UPTD Wilayah III Kota Metro	64
Gambar 7. Monitoring PPK di Jalan Raya Sumber Rejo	72
Gambar 8. Dokumentasi Monitoring Tertib Penyelenggaraan Jasa	74
Gambar 9. Monitoring dan Evaluasi Ruas Kuripan-Putih Doh UPTD V	81
Gambar 10. Monitoring dan Evaluasi Ruas Gedong Tataan-Kedondong	81
Gambar 11. Monitoring dan Evaluasi Ruas Sukamara-Kuripan UPTD V	82
Gambar 12. Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan Objek Pengawasan Eksternal	99
Gambar 13. Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan PPK	99

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BMBK	: Bina Marga dan Bina Konstruksi
BUJK	: Badan Usaha Jasa Konstruksi
BURP	: Badan Usaha Rantai Pasok
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
CCO	: <i>Construction Change Order</i>
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Damija	: Daerah Milik Jalan
JKP	: Jalan Kolektor Primer
JSP	: Jalan Strategis Provinsi
Km	: Kilometer
K3	: Keselamatan dan Kesehatan Kerja
KNKG	: Komite Nasional Kebijakan Governance
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
PHO	: <i>Provisional Hand Over</i>
Pb	: Pembangunan
Permen	: Peraturan Menteri
Pm	: Pemeliharaan
PUPR	: Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat
Renstra	: Rencana Strategis
SDM	: Sumber Daya Manusia
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SIMAK	: Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah

I. PENDAHULUAN

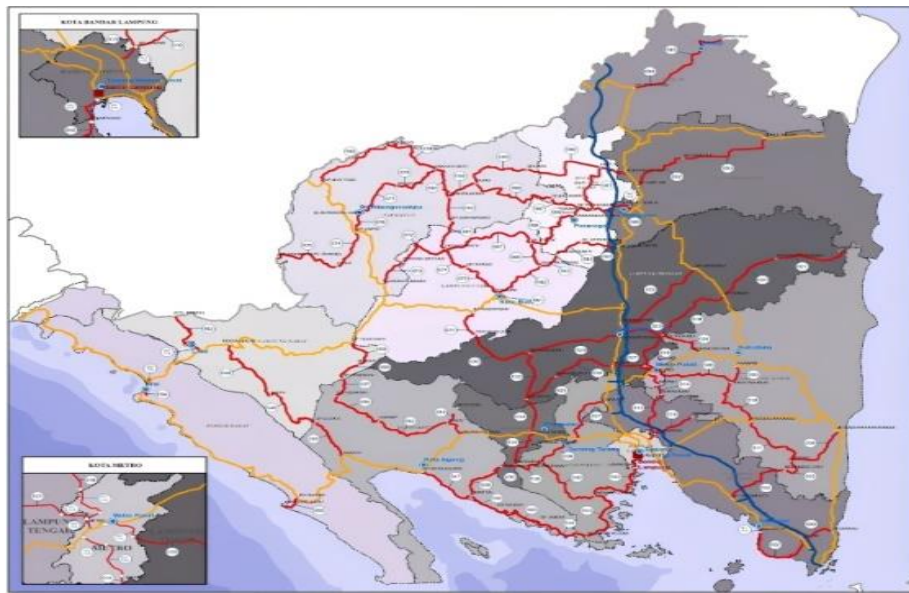
1.1 Latar Belakang Masalah

Aspek penting dalam pembangunan nasional terletak pada sektor infrastruktur yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang maju dan sejahtera. Menurut Khalil (2023) Pembangunan infrastruktur tidak hanya berfungsi sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai alat utama untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, mengurangi kesenjangan antar daerah, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh.

Pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan Nawa Cita dan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa pembangunan harus dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Infrastruktur berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing industri, serta mendukung pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Salah satu sektor infrastruktur yang menjadi perhatian utama adalah pembangunan jalan. Jalan tidak hanya menjadi sarana mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi tulang punggung distribusi logistik, pengembangan wilayah, serta integrasi antar pusat pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, pembangunan jalan merupakan aspek tak terpisahkan dari strategi pembangunan nasional.

Provinsi Lampung, yang terletak di bagian selatan Pulau Sumatera, merupakan salah satu wilayah strategis Indonesia dengan pembangunan infrastruktur yang sangat pesat. Sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera, Lampung juga berfungsi sebagai penghubung utama antara Pulau Jawa dan Sumatera melalui Bakauheni. Posisi geografis ini menjadikan Lampung sangat bergantung pada

infrastruktur jalan yang baik guna mendukung mobilitas barang dan manusia secara efisien dan berkelanjutan. Namun, mengingat perkembangan tersebut, masih terdapat tantangan nyata dalam pengelolaan infrastruktur, terutama terkait kondisi jalan di beberapa daerah yang memengaruhi distribusi dan mobilitas masyarakat. Untuk memberikan gambaran mengenai cakupan dan struktur jaringan jalan yang ada, berikut disajikan peta sebaran ruas jalan provinsi di Lampung.



Gambar 1. Peta Ruas Jalan Provinsi Lampung

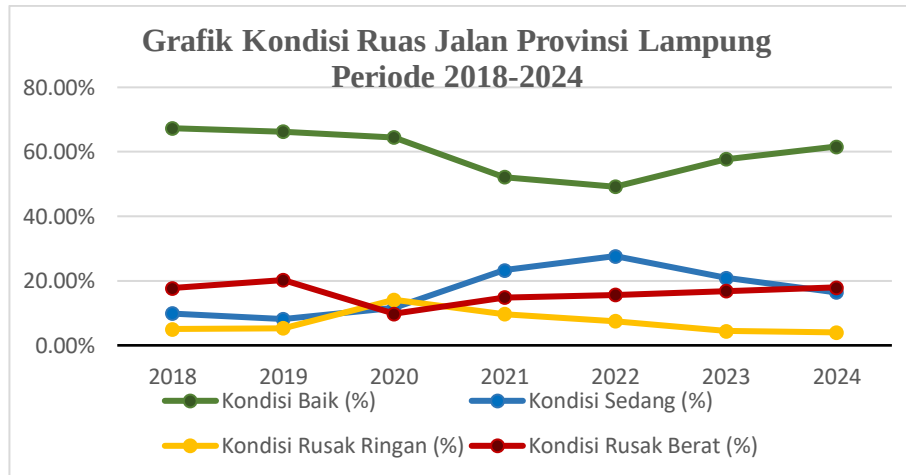
Sumber: BMBK Provinsi Lampung

Berdasarkan data inventarisasi jaringan jalan tahun 2024 yang diperoleh dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, tercatat bahwa jumlah total ruas jalan provinsi mencapai 98 ruas dengan panjang keseluruhan sebesar 1.695,479 km. Data tersebut mencakup klasifikasi fungsi jalan yang terdiri atas Jalan Strategis Provinsi (JSP) dan Jalan Kolektor Primer (JKP) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Setiap ruas jalan memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas antarwilayah, mobilitas penduduk, serta distribusi barang dan jasa yang menunjang kegiatan ekonomi daerah. Sebaran jaringan jalan provinsi tersebut divisualisasikan pada

Gambar 1, yang menunjukkan peta persebaran ruas-ruas jalan berdasarkan klasifikasi dan wilayah administrasi. Visualisasi ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana jaringan jalan provinsi berperan sebagai penghubung utama antara pusat-pusat kegiatan ekonomi dan kawasan strategis di Lampung. Namun demikian, meskipun secara kuantitas cakupan jaringan jalan terlihat memadai, kualitas infrastruktur di lapangan tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi ideal. Banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan ringan hingga berat, yang justru menghambat fungsi dasar dari jaringan tersebut. Dalam konteks ini, penting untuk melihat pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya sebagai proyek fisik, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan dan konektivitas wilayah.

Putra, dkk. (2022) juga menekankan perlunya perencanaan tata ruang dalam pembangunan infrastruktur jalan untuk menghindari ketimpangan antarwilayah. Pendekatan ini memungkinkan perencanaan yang lebih efektif dengan mempertimbangkan karakteristik geografis, tingkat aktivitas wilayah, serta kebutuhan spesifik setiap daerah. Dengan demikian, pengembangan infrastruktur jalan tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik semata, tetapi juga diarahkan pada penciptaan jaringan jalan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan mampu menunjang konektivitas antarwilayah secara optimal.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara berkelanjutan tetap menghadapi berbagai tantangan di lapangan, khususnya pada kondisi sejumlah ruas jalan yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari pemerintah daerah. Data terkait kondisi ruas jalan dari kategori baik, sedang, rusak ringan hingga rusak berat menunjukkan bahwa kerusakan jalan masih menjadi permasalahan yang berulang, yang mengindikasikan perlunya penguatan perencanaan, pemeliharaan, serta pengawasan agar kualitas jalan dapat terjaga sesuai dengan umur rencana teknisnya. Untuk menggambarkan dinamika tersebut, grafik serta tabel di bawah ini menyajikan data kondisi ruas jalan provinsi Lampung dari tahun 2018–2024.



Gambar 2. Grafik Kondisi Ruas Jalan Provinsi Lampung Periode 2018-2024
Sumber: BMBK Provinsi Lampung, 2025

Tabel 1. Kondisi Ruas Jalan Provinsi Periode 2018-2024

Thn	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
	(Km)	%	(Km)	%	(Km)	%	(Km)	%
2018	1.140,18	67,33	167,48	9,89	85,76	5,07	299,86	17,71
2019	1.121,80	66,25	138,24	8,16	90,34	5,34	342,89	20,25
2020	1.091,24	64,45	196,40	11,60	239,44	14,14	166,20	9,82
2021	882,80	52,14	393,70	23,25	164,73	9,73	252,05	14,89
2022	832,66	49,18	468,63	27,68	126,51	7,47	265,48	15,68
2023	979,67	57,78	354,12	20,89	75,58	4,46	286,11	16,87
2024	1.044,72	61,62	279,19	16,46	68,05	4,02	303,52	17,90

Sumber: Dinas BMBK Provinsi Lampung

Berdasarkan data dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) yang dirilis dalam periode 2018 hingga 2024, terlihat fluktuasi yang cukup signifikan dalam kondisi jalan. Meskipun demikian, upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam menangani persoalan ini tidak dapat diabaikan. Melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), berbagai langkah konkret terus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas jalan yang mengalami kerusakan. Perbaikan ini menyasar ruas jalan dengan tingkat kerusakan ringan maupun berat. Upaya-upaya ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin kelayakan sarana transportasi darat, sekaligus meningkatkan konektivitas antarwilayah, khususnya dalam mendukung

pertumbuhan ekonomi dan kelancaran mobilitas masyarakat. Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen memperbaiki infrastruktur jalan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.

Pada periode 2023–2024 terdapat sejumlah ruas jalan provinsi menjadi prioritas perbaikan melalui pelaksanaan berbagai program strategis. Program-program tersebut mencakup pemeliharaan struktur jalan untuk daya tahan jangka panjang, serta pengaspalan ulang guna memperbaiki kualitas permukaan jalan. Perbaikan ini tidak hanya menyasar kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau wilayah-wilayah pedesaan dan perbatasan yang selama ini mengalami keterbatasan aksesibilitas. Namun demikian, meskipun berbagai upaya perbaikan telah dilakukan, fenomena kerusakan jalan yang terjadi secara berulang dalam kurun waktu yang relatif singkat menunjukkan adanya kegagalan dalam menjaga kualitas infrastruktur sesuai dengan umur rencana teknisnya. Kerusakan tersebut terjadi di berbagai ruas jalan provinsi, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, yang semestinya telah melalui proses pemeliharaan rutin dan berkala.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 364 kasus korupsi dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp279,9 triliun. Dari total kasus tersebut, sebanyak 126 kasus atau sekitar 35% merupakan kasus korupsi di sektor infrastruktur, termasuk di dalamnya pembangunan infrastruktur jalan, dengan nilai kerugian negara mencapai sekitar Rp1,3 triliun. Sementara itu, 238 kasus lainnya (65%) berasal dari sektor non-infrastruktur, seperti sektor desa, utilitas, kesehatan, pendidikan, sumber daya alam, dan sektor lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa sektor infrastruktur masih menjadi salah satu sektor yang paling rentan terhadap praktik korupsi, yang pada akhirnya berpotensi berdampak langsung terhadap menurunnya kualitas hasil pembangunan, termasuk daya tahan dan umur layanan infrastruktur jalan.

Selaras dengan pentingnya layanan infrastruktur jalan dalam mendukung pembangunan daerah, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung memiliki peran sentral dalam pengelolaan jaringan jalan provinsi.

Dinas BMBK mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang kebinamargaan, yang meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, serta bidang bina konstruksi, berdasarkan asas otonomi daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Selain itu, BMBK juga melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai pelaksana teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, BMBK secara rutin melakukan pemantauan kondisi ruas jalan serta melaksanakan berbagai upaya perbaikan guna menjaga kelayakan dan fungsionalitas infrastruktur. Namun demikian, kompleksitas pelaksanaan pembangunan jalan yang melibatkan anggaran besar, spesifikasi teknis yang ketat, serta keterlibatan pihak ketiga seperti kontraktor pelaksana menjadikan sektor ini rentan terhadap berbagai bentuk penyimpangan.

Dalam praktiknya, penyimpangan tersebut tidak hanya berpotensi terjadi pada aspek administratif dan pengelolaan anggaran, tetapi juga dapat muncul dalam bentuk kecurangan oleh pihak kontraktor, seperti penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi, pengurangan volume pekerjaan, maupun pelaksanaan pekerjaan yang tidak memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif dan berkelanjutan dalam praktik pembangunan dan pemeliharaan jalan di Provinsi Lampung menjadi sangat penting, tidak hanya untuk memastikan kualitas hasil pembangunan sesuai dengan umur rencana teknisnya, tetapi juga untuk mencegah terjadinya praktik kecurangan dan korupsi, baik yang melibatkan aparatur pemerintah maupun pihak kontraktor, yang pada akhirnya dapat merugikan keuangan daerah dan menurunkan kualitas layanan infrastruktur jalan bagi masyarakat.

Pentingnya pengawasan tersebut tercermin dari berbagai kasus kerusakan jalan yang terjadi di lapangan dan mendapat sorotan publik. Salah satu contohnya diberitakan oleh Kupastuntas.co terkait kerusakan berulang pada Jalan Patimura di Kota Metro, yang merupakan ruas jalan provinsi dengan panjang 3,517 km. Pada tahun 2024, meskipun ruas jalan tersebut baru saja dilakukan perbaikan, persentase kerusakan dalam kategori sedang yang tercatat masih mencapai 8,53%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas hasil pekerjaan belum

sepenuhnya memenuhi standar teknis yang diharapkan, karena ruas jalan tersebut kembali mengalami kerusakan dalam kurun waktu kurang lebih tiga bulan setelah perbaikan dilaksanakan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas pelaksanaan pekerjaan konstruksi serta efektivitas pengawasan dalam proses pembangunan dan pemeliharaan jalan.

Fenomena kerusakan berulang di Jalan Patimura, Kota Metro, menjadi sorotan media karena terjadi di wilayah perkotaan dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi serta berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi lokal. Meskipun secara administratif berada di dalam wilayah Kota Metro, Jalan Patimura merupakan ruas jalan provinsi yang menjadi kewenangan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung. Hal ini menarik perhatian karena Jalan Patimura berada di kawasan kota, bukan di wilayah pedesaan, sementara di kota lain seperti Bandar Lampung yang juga berstatus kota di Provinsi Lampung dimana jalanan provinsi di wilayah perkotaannya umumnya tidak mengalami kerusakan berulang seperti yang terjadi di Jalan Patimura. Perbedaan kondisi ini sering kali menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Banyak warga beranggapan bahwa tanggung jawab perbaikan berada pada pemerintah kota, padahal pengawasan, pembangunan dan pemeliharaannya merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi. Ketidaksesuaian pemahaman ini membuat proses penanganan jalan menjadi tidak optimal, sementara masyarakat Kota Metro yang setiap hari melintasi ruas tersebut tetap menjadi pihak yang paling merasakan dampak langsung dari kerusakan jalan, baik berupa penurunan kenyamanan berkendara, peningkatan risiko kecelakaan, maupun terganggunya aktivitas ekonomi lokal.

Berdasarkan hasil pemantauan lapangan serta informasi yang diperoleh dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, ruas Jalan Patimura direncanakan akan kembali masuk dalam program pemeliharaan pada bulan September 2025 sebagai bagian dari agenda pengawasan rutin. Rencana tersebut menunjukkan adanya keseriusan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menindaklanjuti permasalahan yang terjadi secara berulang serta memastikan keberlanjutan fungsi infrastruktur jalan provinsi. Oleh karena itu, kasus Jalan

Patimura dipilih sebagai salah satu contoh kasus dalam penelitian ini karena menggambarkan secara nyata bagaimana strategi pengawasan yang dijalankan oleh BMBK Provinsi Lampung diterapkan dalam menjaga kualitas konstruksi jalan provinsi. Selain itu, kasus ini juga menjadi contoh konkret pentingnya koordinasi dan peran antarlevel pemerintahan dalam penyelenggaraan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan

Berdasarkan Jurnal Ilmiah Indonesia yang ditulis oleh Sukma, dkk. (2025), perkembangan industri memberikan dampak signifikan terhadap kondisi infrastruktur jalan karena jalan merupakan jalur utama distribusi barang yang menuntut kelancaran, keamanan, dan kenyamanan. Namun, kerusakan jalan yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Lampung, masih menjadi permasalahan berulang meskipun telah dilakukan berbagai upaya pengawasan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi. Kerusakan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti umur rencana jalan yang terlampaui, sistem drainase yang kurang optimal, beban kendaraan berlebih, serta lemahnya perencanaan dan pengawasan di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan masih menghadapi sejumlah kendala, baik dari aspek koordinasi maupun teknis, sehingga penelitian mengenai strategi pengawasan BMBK Provinsi Lampung menjadi penting untuk mengkaji efektivitas pengawasan dalam menjaga kualitas pembangunan dan pemeliharaan jalan.

Meskipun telah diterbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 1 Tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan konstruksi yang mengatur tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi, regulasi tersebut masih bersifat normatif dan memerlukan penjabaran lebih lanjut di tingkat daerah. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Surat Keputusan Gubernur Lampung menetapkan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) sebagai perangkat daerah yang berwenang melaksanakan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi di tingkat provinsi. Penetapan ini menegaskan bahwa kewenangan pengawasan konstruksi jalan provinsi, termasuk ruas jalan di Kota Metro, berada di bawah tanggung jawab Dinas BMBK Provinsi Lampung dengan berlandaskan Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2023.

Pelaksanaan pengawasan konstruksi jalan sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, pemahaman teknis, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan pusat ke dalam tindakan nyata di lapangan. Dalam kondisi tersebut, pengawasan tidak dapat dilakukan secara sporadis atau administratif semata, melainkan memerlukan strategi yang terencana, sistematis, dan adaptif agar mampu mengantisipasi kompleksitas pelaksanaan pekerjaan, keterbatasan sumber daya, serta potensi penyimpangan dalam pembangunan konstruksi jalan. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul “Strategi Pengawasan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dalam Meningkatkan Kualitas Konstruksi Jalan (Studi pada Jalan Provinsi di Kota Metro)” dengan fokus pada kajian perencanaan, mekanisme, dan pola pengawasan yang diterapkan oleh Dinas BMBK Provinsi Lampung.

Penelitian ini tidak berorientasi pada evaluasi hasil pelaksanaan secara menyeluruh, mengingat Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2023 masih berada pada tahap awal implementasi, melainkan diarahkan untuk menelaah sejauh mana strategi pengawasan yang disusun mampu mendukung peningkatan kualitas konstruksi jalan secara berkelanjutan di Kota Metro. Adapun penelitian sebelumnya yang menjadi dasar bagi penelitian ini mencakup hasil-hasil studi yang telah dilakukan sebelumnya. Peneliti menemukan sejumlah jurnal dan skripsi yang dapat dijadikan rujukan, bahan pembandingan, sekaligus acuan dalam penelitian ini, di antaranya adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Abdul Latib & Achmad Khoiri (2022)	Strategi Pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten	Strategi pembangunan dan pemeliharaan jalan oleh Dinas PUPR belum berjalan optimal karena hambatan anggaran, SDM yang belum profesional, serta

Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Jember	lemahnya koordinasi antar instansi. Kurangnya sistem Pengawasan terencana terhadap kontraktor dan minimnya evaluasi membuat banyak kerusakan jalan tidak segera ditangani, yang berdampak pada meningkatnya kecelakaan lalu lintas. Penelitian menekankan pentingnya evaluasi berkala dan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan proyek. Penegakan terhadap kendaraan overloading menjadi bagian dari strategi pemeliharaan yang disarankan
Fatimah, Sudarmi & Muhammad Yusuf (2021)	Pengawasan Infrastruktur Jalan pada Dinas PUPR Kabupaten Bone	Pengawasan preventif tergolong maksimal karena pelibatan konsultan dan pelaksana sejak tahap perencanaan. Namun, pengawasan represif masih belum optimal akibat kendala administratif, lokasi proyek yang jauh, serta terbatasnya personel pengawas. Keterlambatan dalam pengumpulan data menyebabkan proses evaluasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian menyarankan penguatan sistem

Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		dokumentasi dan koordinasi lintas fungsi antar tim.
Muhammad Iqbal N., Randy Aulia N., & M. Rafly Ashari (2022)	Implementasi Pengawasan Legislatif Terhadap Kebijakan Infrastruktur Jalan Provinsi Tahun 2020	Fungsi pengawasan DPRD terhadap pembangunan infrastruktur jalan belum berjalan optimal karena lemahnya sinergi antar lembaga dan tidak terpadunya jaringan jalan provinsi dan nasional. Kondisi tersebut menyebabkan banyak ruas jalan tetap rusak, meningkatkan biaya logistik dan menurunkan efisiensi dan menurunkan efisiensi transportasi. Pengawasan preventif dan represif belum mampu mengintervensi kondisi lapangan secara signifikan. Perlu peningkatan kolaborasi lintas sektor dan penguatan kapasitas pengawasan legislatif.
Muhammad Juarsyah, Dikpride Despa, & Trisya Septiana (2022)	Pengawasan Pekerjaan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Kotabumi–Ketapang (Link 070) di Kabupaten Lampung Utara	Pengawasan teknis terhadap proyek pelebaran jalan harus mencakup pemeriksaan bahan (agregat, hotmix), dokumen teknis, jadwal, dan aspek K3. Keberhasilan konstruksi sangat ditentukan oleh sinergi antara pelaksana, konsultan pengawas

Nama Peneliti/Tahun		Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			dan pengawas teknis. Penelitian menunjukkan bahwa proses pengawasan di lapangan belum sepenuhnya mengacu pada standar teknis nasional. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih terstruktur dan sistematis.
Farida (2023)	Hanum	Efektivitas Fungsi Pengawasan BPD dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Klabang	Fungsi pengawasan oleh BPD belum maksimal karena kualitas SDM yang rendah, minimnya partisipasi, serta lemahnya pelibatan masyarakat. Proyek infrastruktur seperti plengsengan mengalami kerusakan dini akibat lemahnya kontrol pelaksanaan. Musyawarah desa tidak dimanfaatkan secara optimal dalam proses pengawasan. Penelitian menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan transparansi partisipatif di tingkat desa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian yang menganalisis strategi pengawasan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dalam meningkatkan kualitas konstruksi jalan, khususnya pada ruas jalan provinsi di Kota Metro. Penelitian ini menitikberatkan pada penerapan kebijakan pengawasan di tingkat daerah yang

berlandaskan Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2023, yang masih terbatas dikaji secara kontekstual. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Strategi Pengawasan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dalam Meningkatkan Kualitas Konstruksi Jalan (Studi Pada Jalan Provinsi di Kota Metro)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah strategi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dalam meningkatkan kualitas konstruksi jalan Pada Jalan Provinsi di Kota Metro?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis rencana strategi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung dalam meningkatkan kualitas konstruksi jalan provinsi di Kota Metro. Analisis dilakukan berdasarkan dua dimensi strategi pengawasan menurut Simbolon (2004) dalam Nurhasani (2023), yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Kedua dimensi tersebut dikaji sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas BMBK Provinsi Lampung untuk melihat sejauh mana rencana strategi pengawasan yang disusun telah tercapai atau belum tercapai dalam mendukung peningkatan kualitas konstruksi jalan.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya kajian fungsi pengawasan pemerintah daerah

dalam pembangunan infrastruktur publik. Penelitian ini memperluas pemahaman mengenai perancangan dan pelaksanaan strategi pengawasan oleh perangkat daerah melalui pengawasan lapangan dan administratif, serta memperkuat penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pengawasan jasa konstruksi di tingkat daerah.

b. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dalam merancang dan menerapkan strategi pengawasan yang lebih sistematis dan sesuai dengan dinamika lokal. Rekomendasi yang dihasilkan dapat membantu dalam memperkuat mekanisme pengawasan terhadap proyek konstruksi jalan dan meningkatkan koordinasi antar unsur pelaksana pemerintahan daerah, sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang berkelanjutan di Provinsi Lampung

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Ramdhani (2017) menyatakan pembangunan dapat dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan menyempurnakan suatu sistem demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Proses ini melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan berorientasi pada keberlanjutan tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum, kegiatan pembangunan dilaksanakan secara berkelanjutan oleh pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Tachjan dalam Herdiana (2018), substansi dari sebuah kebijakan pada dasarnya merupakan hasil persetujuan dari proses pengambilan keputusan yang terbentuk melalui serangkaian pilihan yang saling berkaitan. Secara umum, kebijakan adalah bentuk upaya atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka mengatur kehidupan publik maupun masyarakat secara luas.

Agar pembangunan dapat berjalan secara optimal, pemerintah merumuskan berbagai kebijakan yang berfungsi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan utama masyarakat serta mengatasi berbagai persoalan yang muncul. Kebijakan publik pada dasarnya muncul berdasarkan adanya dasar atau pijakan yang berfungsi sebagai upaya penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Fungsi utama dari kebijakan publik ini diarahkan untuk menjawab kepentingan serta kebutuhan masyarakat, sejak awal kebijakan tersebut ditetapkan oleh para pemangku kepentingan (Ramdhani, 2017).

Tidak setiap masalah publik secara otomatis dapat dijadikan bahan kebijakan publik. Untuk dapat diangkat menjadi kebijakan, sebuah isu perlu mendapat perhatian serius dari masyarakat serta didorong oleh kelompok yang terorganisir. Masalah publik yang tidak mendapat dukungan kolektif biasanya tidak memperoleh respons yang memadai dari pemerintah. Bahkan, dalam praktiknya, kebijakan publik kerap kali justru didominasi oleh kepentingan pragmatis elit politik, bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam mendorong isu melalui kelompok yang terfokus menjadi kunci agar masalah sosial dapat benar-benar diakomodasi dalam kebijakan. (Mawaza & Khalil, 2020)

Kebijakan publik merupakan kumpulan keputusan yang saling berkaitan dan dikeluarkan oleh lembaga serta pejabat pemerintah yang berwenang. Kebijakan ini erat kaitannya dengan proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk menetapkan langkah atau tindakan tertentu. Sebuah kebijakan publik adalah hasil keputusan dari pihak yang memiliki otoritas, yang sifatnya mengikat bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, kebijakan publik harus disusun oleh pihak yang memiliki mandat dari masyarakat, karena mereka mewakili kepentingan orang banyak (Anggara, 2014).

Kebijakan publik sendiri merupakan instrumen penting dalam menjalankan roda pemerintahan serta mencapai tujuan pembangunan di berbagai sektor. Kebijakan dapat dipahami sebagai rangkaian aktivitas atau tindakan yang berkaitan dengan penyusunan keputusan dan perencanaan program oleh pemerintah. Menurut pandangan Fredrich yang dikutip dalam Agustino (2017), kebijakan adalah serangkaian langkah atau tindakan yang dirancang oleh individu, kelompok, atau lembaga pemerintah dalam konteks tertentu yang mengandung berbagai tantangan dan peluang, di mana kebijakan tersebut disusun untuk mengatasi hambatan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan peningkatan kualitas jalan merupakan wujud nyata dari kebijakan publik yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan infrastruktur transportasi yang andal. Kebijakan ini dirumuskan oleh pemerintah sebagai seperangkat keputusan strategis yang terencana,

sistematis, dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu, daya tahan, serta fungsi jalan agar mampu menunjang mobilitas masyarakat dan memperkuat konektivitas antarwilayah. Peningkatan kualitas jalan memiliki arti penting karena jalan merupakan sarana vital bagi kelancaran arus barang, jasa, dan manusia yang secara langsung memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan jalan yang baik akan memperpendek jarak tempuh, menekan biaya logistik, serta membuka akses menuju kawasan yang sebelumnya terisolasi, sehingga aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat dapat berkembang secara lebih merata.

Kebijakan peningkatan kualitas jalan berperan sebagai instrumen strategis dalam pembangunan daerah. Melalui kebijakan ini, pemerintah berusaha menciptakan keseimbangan pembangunan antarwilayah sekaligus mengurangi kesenjangan sosial ekonomi yang timbul akibat keterbatasan akses transportasi. Peningkatan kualitas jalan juga menjadi langkah konkret pemerintah untuk memperkuat daya saing daerah, mengingat kualitas infrastruktur transportasi menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian indeks daya saing nasional. Dilla dkk. (2024) dalam Jurnal Desentralisasi menegaskan bahwa kebijakan pembangunan infrastruktur jalan termasuk ke dalam kebijakan publik yang bertujuan mewujudkan pemerataan akses, efisiensi mobilitas, serta peningkatan keselamatan pengguna jalan. Kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan landasan hukum yang kuat, di antaranya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, yang menegaskan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan jalan sebagai bagian integral dari sistem transportasi nasional.

Aktor utama dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur di tingkat provinsi adalah pemerintah daerah provinsi itu sendiri. Di Provinsi Lampung, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) berperan sebagai pelaksana teknis utama dalam implementasi kebijakan pembangunan dan pengawasan konstruksi jalan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan agar pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, dilakukan secara berkualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan. Melalui

strategi pengawasan yang diterapkan, pemerintah daerah diharapkan mampu mengidentifikasi dan mengatasi berbagai potensi penyimpangan di lapangan, baik yang bersifat teknis maupun administratif. Pengawasan ini menjadi penting dalam menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran serta keberlanjutan manfaat infrastruktur bagi masyarakat.

Kualitas konstruksi jalan yang buruk tidak hanya berdampak pada kerugian material, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif yang luas bagi masyarakat dan daerah. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pengawasan konstruksi merupakan upaya penting dalam menjamin tertib penyelenggaraan jasa konstruksi agar hasilnya sesuai dengan rencana teknis, spesifikasi mutu, dan umur layanan yang direncanakan. Ketiadaan strategi pengawasan yang efektif dapat menyebabkan terjadinya kerusakan jalan secara berulang, inefisiensi anggaran, bahkan membahayakan keselamatan pengguna jalan.

2.2 Strategi dan Pengawasan

Menurut Kusumadmo (2013), istilah strategi berasal dari bahasa Yunani kuno *strategos*, yang berarti “seni berperang”, dan secara etimologis terbentuk dari gabungan kata *stratos* (prajurit) serta *ego* (pemimpin). Pada awalnya, strategi digunakan dalam konteks militer sebagai seni memimpin pasukan dan mengatur taktik peperangan. Namun, dalam perkembangannya, makna strategi tidak hanya terbatas pada bidang militer, melainkan meluas ke berbagai bidang, termasuk manajemen, bisnis, pemerintahan, hingga pembangunan.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), strategi diartikan sebagai perencanaan yang cermat mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi menekankan pada adanya proses perencanaan yang sistematis dan terarah. Menurut Marrus (2001), strategi dipahami sebagai proses perumusan rencana oleh pimpinan

tertinggi organisasi yang diarahkan pada pencapaian tujuan jangka panjang, serta melibatkan penyusunan langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Menurut Quinn (1999), strategi dapat dipahami sebagai suatu rancangan atau pola tindakan yang menyatukan tujuan pokok, kebijakan, serta langkah-langkah operasional suatu organisasi ke dalam satu kesatuan yang terpadu dan saling mendukung. Dalam pandangannya, terdapat tiga indikator utama yang menjadi dasar dalam penerapan strategi, yaitu:

- a. Tujuan organisasi, yang mencerminkan arah, visi, dan misi yang ingin dicapai oleh organisasi.
- b. Kebijakan organisasi, yakni prinsip atau pedoman pelaksanaan yang digunakan dalam mewujudkan tujuan tersebut.
- c. Aksi utama organisasi, yaitu berbagai program dan aktivitas nyata yang dilaksanakan sebagai bentuk implementasi dari strategi yang telah dirumuskan.

Sementara itu, Hamel dan Prahalad (2001) memandang strategi sebagai serangkaian tindakan yang bersifat bertahap dan berkesinambungan, disusun berdasarkan perspektif mengenai apa yang diinginkan konsumen pada masa mendatang. Strategi pada dasarnya berawal dari kondisi nyata yang sedang terjadi, bukan semata-mata dari prediksi tentang apa yang akan terjadi. Dengan demikian, strategi tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan internal, tetapi juga menekankan pada bagaimana organisasi beradaptasi serta membangun relasi dengan lingkungan eksternal.

Tujuan utama dari penyusunan strategi adalah membantu organisasi meraih keunggulan kompetitif yang efisien dan berkelanjutan di tengah persaingan (Novi V, dalam Gramedia Blog, 2021). Keunggulan kompetitif tersebut diperoleh melalui pengelolaan sumber daya secara tepat, pengambilan keputusan yang akurat, serta kemampuan membaca dinamika lingkungan. Oleh karena itu, strategi dapat dipahami sebagai suatu kerangka yang menyatukan visi, misi, tujuan, serta kebijakan organisasi untuk dapat bersaing, beradaptasi, dan bertahan dalam jangka panjang.

Strategi menjadi landasan utama bagi suatu organisasi beserta seluruh komponennya dalam merumuskan langkah dan tindakan dengan memperhatikan kondisi internal maupun eksternal guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam perumusannya, strategi harus memperhatikan arah, tujuan, serta sasaran organisasi, sekaligus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan tempat strategi itu dijalankan agar tidak bertentangan dengan keadaan yang ada. Selain itu, strategi juga berfungsi sebagai perluasan misi organisasi yang menghubungkan dengan lingkungannya. Strategi harus mampu beradaptasi dan berkembang untuk menghadapi berbagai isu strategis serta memberikan respons yang tepat terhadap pilihan kebijakan yang diambil. Dengan demikian, strategi memiliki kerangka yang jelas untuk menentukan sasaran yang ingin dicapai, karena pada hakikatnya strategi merupakan alat utama dalam meraih tujuan (Supriatna, 2018).

Menurut Mulgan (2009), *“Public strategy is the systematic use of public resources and powers, by public agencies, to achieve public goods.”* Artinya, strategi publik dapat diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya dan kewenangan secara terencana dan terstruktur oleh lembaga pemerintahan guna mewujudkan kepentingan masyarakat luas. Strategi ini berfokus pada bagaimana organisasi pembuat kebijakan (pemerintah) mengelola kekuasaan dan sumber daya yang dimiliki demi tercapainya tujuan bagi masyarakat.

Menurut Mulgan (2009), strategi publik dapat dipahami sebagai proses pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya serta kekuasaan publik secara sistematis oleh lembaga pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Istilah *public* dalam konteks ini mengacu pada masyarakat atau warga negara yang menjadi sasaran dari kebijakan pemerintah. Lebih lanjut, Mulgan menjelaskan bahwa strategi publik berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dalam menentukan arah berpikir dan bertindak secara strategis, dengan tujuan memberikan kejelasan mengenai apa yang ingin dicapai serta langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk mewujudkannya.

Dalam konteks pembangunan, strategi menjadi elemen penting yang menentukan keberhasilan suatu program. Hal ini juga berlaku dalam

pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Lampung, di mana strategi yang matang dibutuhkan tidak hanya dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan, tetapi juga dalam proses pengawasan. Jika berbicara mengenai pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap kualitas konstruksi jalan, maka yang dibahas adalah bagaimana strategi tersebut diimplementasikan oleh aktor birokrasi dalam sistem pemerintahan. Strategi dalam hal ini bukan sekadar teknis pelaksanaan program, melainkan kerangka berpikir sistematis untuk menjawab persoalan publik yang kompleks. Pengawasan pembangunan jalan yang melibatkan banyak pihak dan kepentingan tentu memerlukan pendekatan strategis yang terencana, adaptif, dan mampu menjamin tercapainya tujuan pembangunan yang berkualitas.

Pengawasan berperan sebagai elemen utama yang dalam manajemen pemerintahan. Fungsi ini tidak hanya berperan dalam memastikan jalannya aktivitas pemerintahan secara tertib dan teratur, tetapi juga menjadi alat strategis dalam menjaga kualitas pelaksanaan kebijakan publik. Pengawasan tidak sekadar dimaknai sebagai sarana untuk menemukan kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaan kegiatan, melainkan juga sebagai instrumen untuk melakukan koreksi, mencegah potensi penyimpangan, serta mengendalikan proses agar tetap sesuai dengan rencana, aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Mockler dalam Sari dkk. (2015), pengawasan manajemen merupakan suatu upaya sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan berdasarkan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, serta membandingkan hasil kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, pengawasan juga mencakup upaya mengoreksi setiap bentuk penyimpangan atau kesalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan, khususnya di lingkungan organisasi pemerintahan. Sementara itu, Manullang (2006) menjelaskan bahwa pengawasan merupakan proses menilai pelaksanaan kegiatan yang sudah dilakukan serta apabila ditemukan adanya penyimpangan, maka dilakukan tindakan korektif agar pelaksanaan kegiatan tersebut tetap sesuai dengan rencana dan tujuan semula.

Proses pengawasan umumnya terdiri atas beberapa tahap. Pertama, penetapan standar pelaksanaan pekerjaan, yaitu kriteria atau ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana pekerjaan dilaksanakan dengan baik. Standar pelaksanaan (*standard performance*) menggambarkan kondisi ideal yang seharusnya terjadi apabila suatu pekerjaan dilakukan secara memuaskan. Kedua, pengukuran hasil atau pelaksanaan pekerjaan, yakni tahap untuk membandingkan hasil aktual dengan standar yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, apabila ditemukan perbedaan antara hasil dan standar, maka dilakukan tindakan perbaikan (koreksi). Proses koreksi ini berkaitan erat dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, penataan staf, dan pengarahan, karena pengawasan pada dasarnya berfungsi memastikan seluruh aktivitas organisasi berjalan selaras dengan rencana yang telah dirancang sebelumnya.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah merupakan suatu rangkaian aktivitas yang bertujuan memastikan jalannya pemerintahan daerah berlangsung secara optimal dan terarah sesuai dengan rencana serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dapat diartikan sebagai kegiatan memeriksa atau mengendalikan yang dilakukan oleh pihak berwenang terhadap pihak yang berada dalam lingkup kewenangannya, dengan tujuan memastikan bahwa seluruh aktivitas pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi serta tata kelola yang baik. Menurut Atmosudirjo (1982), pengawasan atau *controlling* dipahami sebagai serangkaian aktivitas yang bertujuan menilai serta membandingkan pelaksanaan suatu pekerjaan dengan ukuran, norma, standar, maupun rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam konteks tersebut, pengawasan menjadi unsur krusial dalam mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan publik yang mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Artinya, fungsi pengawasan tidak semata-mata digunakan sebagai sarana kontrol administratif, tetapi juga sebagai mekanisme penting untuk menjaga agar seluruh proses pemerintahan tetap berada pada jalur yang benar. Dengan hal ini, keberadaan pengawasan sama pentingnya dengan penerapan prinsip-prinsip

good governance itu sendiri, karena keduanya saling melengkapi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel (Sinaga, 2013).

Adapun teori strategi pengawasan menurut Simbolon (2004) dalam Nurhasani 2023 menjelaskan bahwa strategi pengawasan terdiri atas dua dimensi utama, yakni pengawasan secara langsung dan pengawasan secara tidak langsung. Bentuk pengawasan langsung dilaksanakan melalui keterlibatan pimpinan secara aktif dalam kegiatan kerja bawahan, seperti memberikan arahan, melakukan observasi, serta menilai disiplin dan tanggung jawab pegawai di tempat kerja. Sementara itu, pengawasan tidak langsung dilakukan melalui mekanisme administratif, misalnya melalui laporan tertulis, evaluasi berkala, serta penilaian hasil kerja pegawai berdasarkan target dan indikator yang telah ditentukan. Kedua dimensi ini saling melengkapi karena pengawasan langsung berfungsi membangun kedisiplinan dan motivasi kerja, sedangkan pengawasan tidak langsung memastikan akuntabilitas dan konsistensi kinerja pegawai sesuai perencanaan organisasi.

Konsep pengawasan yang dikemukakan Simbolon tersebut sejalan dengan mekanisme yang diterapkan dalam pelaksanaan pengawasan konstruksi jalan di Provinsi Lampung, di mana aktor utamanya adalah Dinas BMBK Provinsi Lampung. Strategi pengawasan BMBK dilaksanakan sebagai bagian dari penerapan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi menegaskan bahwa pengawasan harus dilaksanakan secara rutin maupun insidental melalui pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan, mencakup pengawasan langsung di lapangan serta pengawasan administratif melalui mekanisme pelaporan dan evaluasi berkala. Dengan demikian, penerapan teori Simbolon dalam konteks pengawasan konstruksi oleh BMBK Provinsi Lampung mencerminkan integrasi antara kontrol langsung dan tidak langsung guna menjamin tertib usaha, tertib penyelenggaraan, serta tertib pemanfaatan jasa konstruksi sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

- a. Melakukan pengawasan lapangan secara berkala.
- b. Melakukan pengawasan tertib usaha dengan objek pengawasannya ialah Badan Usaha Rantai Pasok (BURP) dan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK.)
- c. Melakukan pengawasan tertib penyelenggran jasa konstruksi dan pengawasan tertib pemanfaatan produk dengan objek pengawasannya ialah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/pengguna jasa.
- d. Menindaklanjuti hasil temuan pengawasan dengan sanksi administratif maupun korektif

Strategi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas BMBK Provinsi Lampung tidak hanya berpedoman pada regulasi normatif sebagaimana diatur dalam Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2023, tetapi juga perlu dianalisis melalui pendekatan strategis yang terstruktur dan adaptif. Pendekatan ini menekankan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap aturan, melainkan juga oleh sejauh mana lembaga mampu mengintegrasikan aspek pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Dalam konteks penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori strategi pengawasan menurut Simbolon (2004) dalam Nurhasani 2023 yang menjelaskan bahwa strategi pengawasan terdiri atas dua dimensi utama, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Kedua dimensi ini menjadi dasar dalam menganalisis bagaimana pelaksanaan strategi pengawasan dijalankan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung.

a. Pengawasan Langsung (*Direct Supervision*)

Menurut Simbolon (2004), pengawasan langsung merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan melalui keterlibatan aktif pimpinan atau pejabat berwenang dalam pelaksanaan kegiatan secara langsung di lapangan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana kerja, standar teknis, serta ketentuan yang telah ditetapkan organisasi. Dalam konteks penelitian ini, pengawasan langsung oleh Dinas BMBK Provinsi Lampung dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan. Pengawasan tersebut meliputi pemeriksaan progres pekerjaan,

kesesuaian hasil dengan spesifikasi teknis, serta observasi terhadap pelaksanaan pekerjaan di lokasi proyek. Melalui mekanisme ini, BMBK berupaya memastikan proses konstruksi berjalan sesuai perencanaan dan mendukung peningkatan kualitas infrastruktur jalan di Provinsi Lampung.

b. Pengawasan Tidak Langsung (*Indirect Supervision*)

Menurut Simbolon (2004), pengawasan tidak langsung merupakan bentuk pengawasan yang dilaksanakan melalui mekanisme administratif dan evaluatif, tanpa keterlibatan langsung di lapangan. Pengawasan ini mencakup kegiatan seperti pemeriksaan laporan, verifikasi dokumen, serta analisis hasil kerja berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan organisasi. Dalam konteks penelitian ini, pengawasan tidak langsung oleh Dinas BMBK Provinsi Lampung dilakukan melalui proses pemeriksaan dan verifikasi dokumen administrasi, laporan hasil pekerjaan, serta evaluasi rutin terhadap pelaksanaan kegiatan konstruksi jalan. Melalui mekanisme ini, BMBK dapat memastikan kesesuaian data, ketepatan pelaporan, dan keterpaduan informasi antara hasil pekerjaan di lapangan dengan dokumen administrasi yang menjadi dasar pengawasan.

2.3 Good Governance

Jika kita berbicara tentang tata kelola pemerintahan yang baik, maka kita tidak dapat melepaskannya dari konsep *good governance*. Dalam konteks pemerintahan daerah, terutama dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur seperti konstruksi jalan, prinsip-prinsip *good governance* menjadi landasan penting untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara etimologis, istilah *good governance* dapat diartikan sebagai tata kelola yang baik, penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, atau pemerintahan yang berwibawa. Beberapa pendapat bahkan menyarankan bahwa istilah *good governance* lebih tepat dipahami sebagai bentuk dari etika pemerintahan (*ethical governance*), karena mengandung nilai-nilai moral dalam

pelaksanaannya. Istilah ini tidak memiliki definisi tunggal yang bersifat baku, melainkan lebih banyak dijelaskan melalui ciri-ciri atau prinsip-prinsip yang melekat

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan konsep yang bersifat kolektif, di mana seluruh elemen baik pemerintah maupun nonpemerintah terlibat dalam mengarahkan, mengendalikan, serta mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan masyarakat. Konsep ini tidak hanya terbatas pada tata kelola lembaga pemerintahan, tetapi juga mencakup berbagai institusi lain yang memiliki peran dalam penyelenggaraan urusan publik. Dalam penerapannya, *good governance* identik dengan pemerintahan yang bersih (*clean government*), yaitu pemerintahan yang berjalan secara efektif, efisien, jujur, transparan, serta memiliki tanggung jawab yang tinggi. Suatu pemerintahan dapat dikatakan baik apabila produktivitasnya mampu mendorong peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat, baik dari sisi produktivitas, daya beli, maupun kesejahteraan spiritual (Nurhidayat, 2023).

Menurut Bank Dunia, tata kelola pemerintahan yang baik harus mencerminkan sistem yang dapat diprediksi (*predictable*), bersifat transparan, serta dalam proses pengambilan kebijakannya bebas dari kecurigaan atau penyimpangan, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara publik. *Good governance* sendiri merupakan sebuah mekanisme, praktik, dan proses yang digunakan oleh negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menyusun arah strategis, mengelola sumber daya, dan menyelesaikan masalah publik berdasarkan nilai-nilai keadilan, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas (Khairudin dkk., 2021). Dengan kata lain, *good governance* tidak hanya mengatur soal administrasi teknis, tetapi juga menyangkut moralitas dan tanggung jawab sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam konteks penelitian ini, prinsip *good governance* menjadi dasar penting dalam menilai efektivitas strategi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), tujuan utama *good governance*

adalah menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat serta kepercayaan publik terhadap negara. Prinsip ini sangat relevan dengan pelaksanaan pengawasan konstruksi jalan, karena pengawasan tidak hanya menilai aspek teknis dan mutu konstruksi, tetapi juga harus menjamin transparansi dalam penggunaan anggaran, partisipasi publik dalam pengawasan, serta akuntabilitas birokrasi dalam setiap tahapan pembangunan.

Dalam hal ini, Dinas BMBK Provinsi Lampung memiliki peran strategis untuk memastikan seluruh proses pembangunan infrastruktur jalan berjalan profesional dan akuntabel. Upaya pengawasan teknis yang dilakukan oleh BMBK tidak dapat dilepaskan dari penerapan nilai-nilai *good governance*, terutama dalam tiga prinsip utama.

- a. Transparansi, melalui keterbukaan informasi terkait proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek konstruksi jalan;
- b. Partisipasi, dengan melibatkan pemangku kepentingan seperti masyarakat, kontraktor, dan pengawas lapangan dalam pelaksanaan proyek;
- c. Akuntabilitas, dengan memastikan seluruh penggunaan anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun teknis.

Hal ini sejalan dengan pandangan Karso (2022) yang menegaskan bahwa implementasi *good governance* menuntut birokrasi publik untuk mengubah paradigma pelayanan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta membangun sistem evaluasi kinerja yang berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, strategi pengawasan yang diterapkan oleh BMBK tidak hanya bertujuan menjaga mutu konstruksi jalan, tetapi juga menjadi wujud penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat daerah. Dengan menerapkan pengawasan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, pemerintah daerah dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjamin penggunaan anggaran pembangunan infrastruktur yang efisien dan tepat sasaran.

2.4 Kerangka Pikir

Permasalahan kualitas konstruksi jalan yang belum optimal di Provinsi Lampung, khususnya pada ruas jalan provinsi di Kota Metro, seharusnya menjadi perhatian utama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung. Kondisi tersebut tercermin dari masih ditemukannya kerusakan jalan, baik dalam kategori ringan maupun berat, meskipun telah dilakukan berbagai upaya pembangunan dan pemeliharaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan fungsi pengawasan yang didukung oleh sinergi antara BMBK dan perangkat daerah terkait guna memastikan penyelenggaraan jasa konstruksi berjalan sesuai ketentuan Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2023. Sinergi lintas sektor diharapkan mampu mendorong terciptanya pengawasan yang lebih terkoordinasi, komprehensif, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas konstruksi jalan.

Penelitian ini bertujuan menelaah rencana strategi pengawasan yang disusun dan diterapkan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dalam meningkatkan kualitas konstruksi jalan provinsi di Kota Metro. Kajian ini menjadi penting mengingat penerapan Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi masih berada pada tahap awal implementasi di tingkat daerah. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk meninjau sejauh mana rencana strategi pengawasan yang dirancang oleh BMBK Provinsi Lampung telah tercapai atau belum tercapai, serta menilai kesesuaiannya dengan kebutuhan daerah dan ketentuan nasional dalam mendukung peningkatan kualitas konstruksi jalan. Untuk menganalisis rencana strategi tersebut, penelitian ini menggunakan teori strategi pengawasan menurut Simbolon (2004) dalam Nurhasani 2023, yang membagi pengawasan menjadi dua dimensi utama, yaitu:

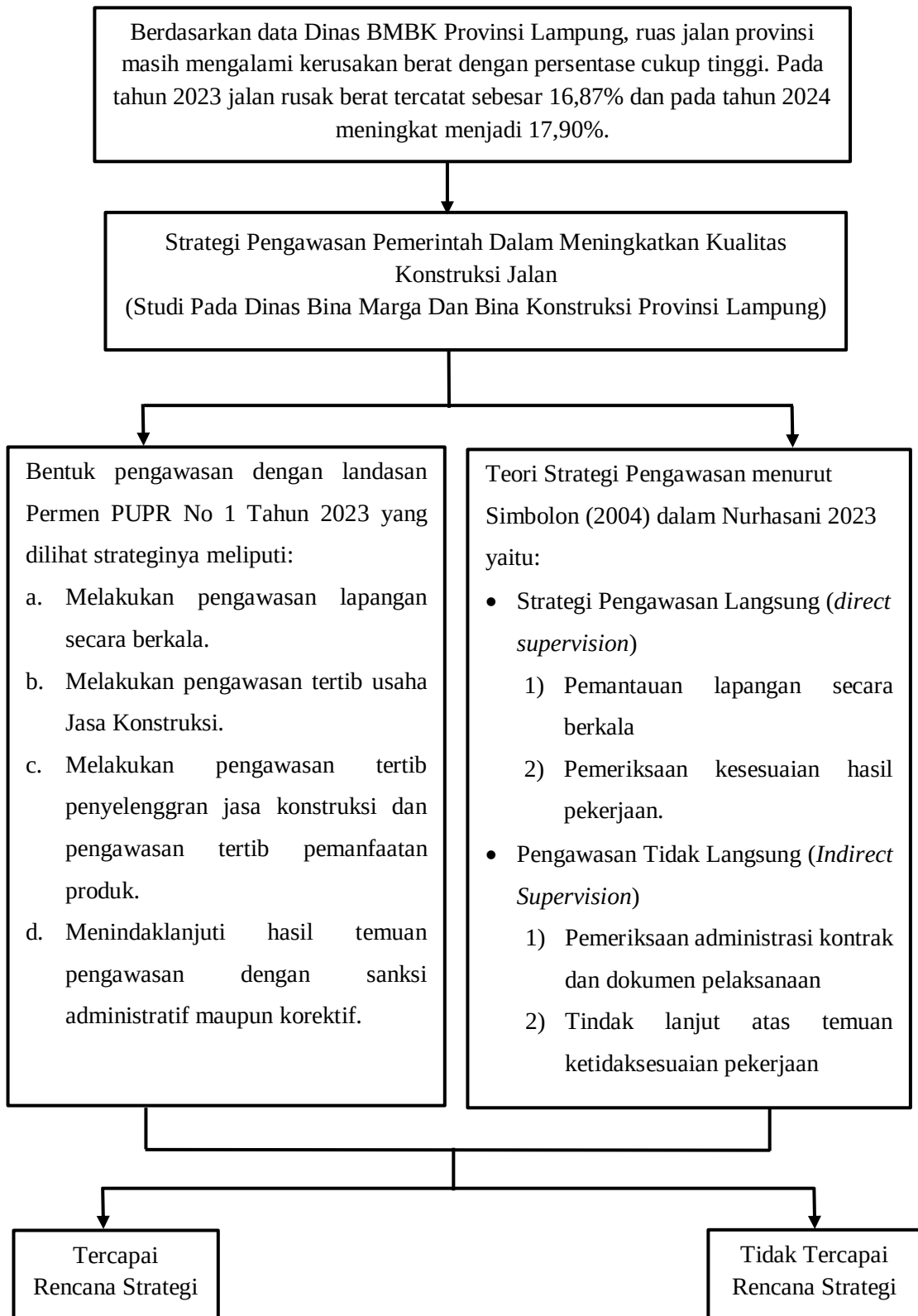
- Pengawasan Langsung (*Direct Supervision*)
 - a. Pemantauan lapangan secara berkala
 - b. Pemeriksaan kesesuaian hasil pekerjaan.
- Pengawasan Tidak Langsung (*Indirect Supervision*)
 - a. Pemeriksaan administrasi kontrak dan dokumen pelaksanaan

- b. Tindak lanjut atas temuan ketidaksesuaian pekerjaan

Adapun bentuk pengawasan yang dilihat strateginya meliputi:

- a. Melakukan pengawasan lapangan secara berkala.
- b. Melakukan pengawasan tertib usaha dengan objek pengawasannya ialah BURP dan BUJK.
- c. Melakukan pengawasan tertib penyelenggran jasa konstruksi dan pengawasan tertib pemanfaatan produk dengan objek pengawasannya ialah PPK /pengguna jasa.
- d. Menindaklanjuti hasil temuan pengawasan dengan sanksi administratif maupun korektif

Maka dari itu, penulis menyusun skema kerangka berpikir secara sederhana sebagaimana pada gambar yang sebagai berikut:



Gambar 3. Kerangka Berfikir
(Diolah Peneliti, 2025)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Menurut Sugiyono (2012), metode penelitian merupakan langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena melalui kajian yang terfokus dan rinci pada tiap kasus, karena sifat permasalahan yang diteliti dapat berbeda-beda. Agar dapat dikatakan sebagai penelitian yang baik, metode kualitatif memerlukan data yang akurat dan lengkap, baik data primer maupun sekunder. Sejalan dengan itu, Bennett dan Elman dalam Sahir 2021 menyatakan bahwa metode kualitatif memiliki keunggulan komparatif dalam membangun keterkaitan internal antara langkah-langkah penelitian dan pengembangan konsep yang valid.

Penelitian kualitatif dalam studi ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data yang akurat dan pemahaman yang mendalam mengenai strategi pengawasan konstruksi jalan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung berdasarkan Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2023. Pendekatan ini digunakan karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara menyeluruh proses pelaksanaan pengawasan, mekanisme koordinasi antarbagian, serta kendala yang dihadapi di lapangan dalam konteks yang alami. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan pengawasan, seperti pejabat struktural, pengawas lapangan, dan konsultan pengawas, guna memperoleh informasi faktual terkait strategi dan praktik pengawasan yang diterapkan. Selain itu, peneliti juga

melakukan penelaahan terhadap dokumen-dokumen resmi, seperti laporan hasil pengawasan, peraturan teknis, serta pedoman pelaksanaan proyek, sebagai bagian dari proses triangulasi untuk memperkuat validitas data. Dengan kombinasi teknik tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara komprehensif dari penerapan strategi pengawasan konstruksi jalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2023.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung untuk mendapatkan gambaran nyata atas fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada fokus studi yang meneliti strategi pengawasan konstruksi jalan oleh BMBK Provinsi Lampung, khususnya dalam implementasi kebijakan berdasarkan Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2023. Dinas ini memiliki peran penting dalam pengawasan teknis dan administrasi terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Lampung, sehingga relevan sebagai tempat pengambilan data guna memperoleh informasi yang akurat dan mendalam.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan untuk memahami secara mendalam strategi pengawasan yang diterapkan oleh Dinas BMBK Provinsi Lampung dalam meningkatkan kualitas konstruksi jalan Pada jalan Provinsi di Kota Metro, dengan mengacu pada kebijakan nasional, khususnya Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Regulasi tersebut bersifat normatif dan menyeluruh, sehingga masih memerlukan penjabaran yang kontekstual di tingkat daerah. Implementasi kebijakan ini tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada

kesiapan kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, pemahaman teknis-administratif, serta kemampuan daerah dalam menerjemahkan ketentuan pusat ke dalam strategi yang sesuai dengan kondisi lokal. Dalam konteks ini, strategi pengawasan tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan pengawasan di lapangan, tetapi juga sebagai upaya strategis dalam membangun sistem pengawasan yang adaptif, partisipatif, dan terukur. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori strategi pengawasan menurut Simbolon (2004) dalam Nurhasani 2023 yang membedakan dua dimensi utama pengawasan, yaitu:

a. Pengawasan Langsung (*Direct Supervision*)

Menurut Simbolon (2004), pengawasan langsung merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan melalui keterlibatan aktif pimpinan atau pejabat berwenang di lapangan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana, standar teknis, dan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, Dinas BMBK Provinsi Lampung melaksanakan pengawasan langsung melalui kegiatan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan, memastikan kesesuaian antara hasil pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan dokumen perencanaan, serta meninjau kondisi jalan yang telah diperbaiki agar sesuai dengan prinsip tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan produk jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2023.

Kegiatan pengawasan langsung ini mencakup dua indikator utama, yaitu:

1) Pemantauan lapangan secara berkala

Dilakukan oleh tim pengawas, Konsultan Supervisi, PPK, dan UPTD untuk memastikan progres fisik pekerjaan sesuai dengan rencana dan laporan administrasi

2) Pemeriksaan kesesuaian hasil pekerjaan

Untuk menilai apakah hasil konstruksi telah memenuhi spesifikasi teknis dan standar mutu sesuai dokumen perencanaan.

b. Pengawasan Tidak Langsung (*Indirect Supervision*)

Menurut Simbolon (2004), pengawasan tidak langsung merupakan bentuk pengawasan yang dilaksanakan melalui mekanisme administratif dan

evaluatif tanpa keterlibatan langsung di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, Dinas BMBK Provinsi Lampung melaksanakan pengawasan tidak langsung melalui pemeriksaan administrasi kontrak dan dokumen pelaksanaan, verifikasi laporan hasil pengawasan dari bidang pelaksana, Konsultan Supervisi, UPTD dan PPK, serta penanganan terhadap temuan yang tidak sesuai dengan standar teknis pekerjaan. Pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa setiap tahapan kegiatan konstruksi berjalan sesuai dengan ketentuan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2023, sekaligus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan ketertiban administratif dalam tata kelola pengawasan konstruksi di Provinsi Lampung. Kegiatan pengawasan tidak langsung ini mencakup dua indikator utama, yaitu:

1) Pemeriksaan administrasi kontrak dan dokumen pelaksanaan

Untuk memastikan kesesuaian antara dokumen kontrak, jadwal, serta laporan kemajuan pekerjaan dengan ketentuan pengawasan jasa konstruksi.

2) Tindak lanjut atas temuan ketidaksesuaian pekerjaan

Dilakukan dengan memberikan teguran kepada pelaksana baik secara lisan maupun tertulis, disertai permintaan perbaikan terhadap bagian pekerjaan yang tidak sesuai standar teknis.

Berdasarkan hal tersebut, fokus penelitian ini diarahkan untuk meninjau arah dan kesiapan rencana strategi pengawasan BMBK Provinsi Lampung terhadap peningkatan kualitas konstruksi jalan, dengan melihat bagaimana penerapan teori strategi tersebut tercermin dalam bentuk pengawasan berikut:

- a. Melakukan pengawasan lapangan secara berkala.
- b. Melakukan pengawasan tertib usaha jasa konstruksi.
- c. Melakukan pengawasan tertib penyelenggran jasa konstruksi dan pengawasan tertib pemanfaatan produk.
- d. Menindaklanjuti hasil temuan pengawasan dengan sanksi administratif maupun korektif

Melalui kajian terhadap keempat bentuk pengawasan tersebut, penelitian ini berupaya menilai sejauh mana strategi pengawasan yang telah dirumuskan oleh BMBK Provinsi Lampung telah tercapai atau belum tercapai dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran konkret mengenai tingkat ketercapaian rencana strategi pengawasan dalam mendukung peningkatan kualitas konstruksi jalan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan di Provinsi Lampung.

3.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber tangan pertama yang terlibat dalam kegiatan pengawasan konstruksi jalan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung. Data ini bersifat otentik dan objektif karena mencerminkan kondisi nyata di lapangan serta digunakan untuk menganalisis pelaksanaan strategi pengawasan dengan landasan Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2023. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan pejabat dinas, pengawas proyek, dan konsultan supervisi. Data tersebut menjadi dasar dalam memahami penerapan strategi pengawasan dan permasalahan yang muncul di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, melainkan bersumber dari pihak lain yang relevan. Data ini digunakan sebagai pelengkap dan penguat terhadap data primer agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif. Sumber data sekunder meliputi dokumen resmi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, peraturan perundang-undangan seperti Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2023, laporan hasil pengawasan, serta literatur dan

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan strategi pengawasan konstruksi jalan.

3.5 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif digunakan istilah “informan” untuk menggantikan istilah sampel. Informan adalah individu yang dianggap paling memahami persoalan yang diteliti, bersedia menjadi sumber informasi, terbuka untuk berdiskusi, serta mampu memberikan arahan kepada peneliti untuk menggali informasi secara lebih dalam terhadap permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Informasi Penelitian

Nama		Jabatan	Alasan
Yudi Aryanto		Kepala Bidang Bina Konstruksi BMBK Provinsi Lampung	Dipilih karena memiliki peran strategis dalam mengarahkan dan mengoordinasikan kegiatan pengawasan konstruksi di tingkat provinsi Lampung
Fasheria Khendia Utomo		Kepala Seksi Pengatur Konstruksi BMBK Provinsi Lampung	Dipilih karena berperan dalam pengaturan teknis pelaksanaan pengawasan dan pembinaan konstruksi sesuai Permen PUPR No. 1 Tahun 2023
M. Ali Hanafiah		Kepala Seksi Pemberdayaan konstruksi BMBK Provinsi Lampung	Dipilih karena berperan dalam peningkatan kapasitas pelaku jasa konstruksi yang terkait langsung dengan kegiatan pengawasan

Nama	Jabatan	Alasan
Sulfi Melianti	Analisis Jasa Konstruksi BMBK Provinsi Lampung	Dipilih karena memahami aspek administratif dan analisis hasil pengawasan konstruksi.
Susilowati	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BMBK Provinsi Lampung	Dipilih karena bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan kontrak dan pengawasan teknis proyek konstruksi jalan.
Herwan Fintriansyah	Seksi Jalan Dan Jembatan UPTD Wilayah III Dinas Bmbk Provinsi Lampung	Dipilih karena terlibat langsung dalam pelaksanaan pengawasan di wilayah kerja yang menjadi objek penelitian
Pipit Komala Dewi	Konsultan Supervisi	Dipilih karena terlibat secara langsung dalam kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi jalan di lapangan
Nur Aisyah	Masyarakat	Dipilih karena dianggap mampu memberikan perspektif masyarakat terkait pelaksanaan dan dampak pembangunan jalan

Sumber: Hasil Wawancara 2025

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2018), secara umum terdapat empat macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi, yang merupakan kombinasi dari observasi, wawancara,

dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, merupakan teknik untuk memperoleh data primer dengan cara mengamati langsung objek penelitian di lapangan (Patton dalam Nasution, 1980). Melalui metode ini, peneliti dapat merekam berbagai aktivitas dan fenomena yang berkaitan dengan strategi pengawasan konstruksi jalan. Observasi dilakukan selama kurang lebih lima bulan, terhitung sejak tanggal 10 Maret 2025 hingga 22 Agustus 2025, bertepatan dengan pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung. Selama periode tersebut, peneliti mengamati berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan strategi pengawasan jasa konstruksi, termasuk interaksi antarpegawai, mekanisme pelaporan internal, serta pola koordinasi antarbidang.
- b. Wawancara, merupakan metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan responden (Nazir, 1999). Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur, yaitu bentuk wawancara yang dilakukan dengan panduan umum berdasarkan isu penelitian, namun tetap memberi ruang bagi peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan arah pembicaraan dan respons dari masing-masing informan (Syafriada Hafni Sahir, 2022). Informan yang diwawancarai meliputi Kepala Bidang Bina Konstruksi, Kasi Pengaturan Konstruksi, Kasi Pemberdayaan Jasa Konstruksi, Analis Jasa Konstruksi, Pengawas UPTD Wilayah III, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta masyarakat. Melalui wawancara ini, peneliti memperoleh informasi mendalam mengenai rencana strategi pengawasan konstruksi jalan yang dijalankan, termasuk kebijakan, koordinasi antarbidang, dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan peraturan permen PUPR No 1 Tahun 2023.
- c. Dokumentasi, merupakan rekaman atau catatan mengenai peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Dokumen dapat berwujud teks tertulis, visual, maupun hasil karya monumental seseorang. Dokumen tertulis dapat berupa catatan harian, riwayat hidup, narasi, biografi, peraturan, maupun kebijakan.

Sementara dokumen visual mencakup foto, video, sketsa, dan bentuk gambar lainnya (Sugiyono, 2005). Dokumen digunakan sebagai sumber data tambahan yang berfungsi untuk memverifikasi kebenaran informasi, membantu penafsiran temuan penelitian, serta menjadi pelengkap bagi data primer yang diperoleh sebelumnya. Adapun dokumentasi yang digunakan adalah sebagai berikut.

- 1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023.
- 2) Data Ruas-Ruas Jalan Provinsi Lampung.
- 3) Foto Peta Ruas-Ruas Jalan Provinsi Lampung.
- 4) Data Kondisi Jalan Mantap Dan Tidak Mantap Di Provinsi Lampung Tahun 2018-2024.
- 5) Data Perbaikan Dan Pemeliharaan Tahun 2023-2024.
- 6) Dokumen Sk Bidang Bina Konstruksi
- 7) Foto Kegiatan Pengawasan
- 8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

3.7 Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul, tahap selanjutnya dalam proses penelitian adalah pengolahan data, yang dilakukan berdasarkan ketentuan analisis yang telah dirancang sebelumnya. Menurut Effendi (2008) menyebutkan dua teknik utama yaitu sebagai berikut:

- a. *Editing Data*, yaitu pada tahap ini, peneliti melakukan proses seleksi dan pemeriksaan kembali terhadap seluruh data yang telah terkumpul untuk memastikan keabsahan, kelengkapan, dan konsistensi data sebelum dianalisis lebih lanjut. Kegiatan ini mencakup penelaahan terhadap hasil wawancara dan dokumentasi dengan cara menyesuaikan isi data pada pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Data yang dianggap relevan kemudian dipilih dan disusun secara sistematis agar siap digunakan dalam proses analisis sesuai dengan fokus penelitian mengenai strategi

pengawasan konstruksi jalan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung berdasarkan Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2023.

- b. Interpretasi Data, Setelah proses editing dilakukan, peneliti melanjutkan ke tahap interpretasi data, yaitu menafsirkan makna yang terkandung dalam data yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini, data tidak hanya dijelaskan atau dianalisis secara deskriptif, tetapi juga diinterpretasikan untuk menemukan hubungan, makna, dan pola yang relevan dengan fokus penelitian. Peneliti kemudian menarik kesimpulan berdasarkan hasil temuan lapangan yang telah disesuaikan dengan teori dan ketentuan dalam Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2023. Hasil interpretasi disajikan dengan bahasa yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami sehingga dapat menggambarkan secara komprehensif strategi pengawasan konstruksi jalan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.

3.8 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, di mana data dianalisis dengan cara menggambarkan atau menjelaskan hasil temuan dari lapangan, termasuk data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan berbagai sumber lainnya. Penelitian kualitatif dapat menjadi sangat kompleks karena meskipun berfokus pada permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya, arah penelitian dapat berkembang seiring dengan dinamika yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, peneliti perlu melakukan berbagai upaya agar fokus penelitian tetap terjaga dan tidak melebar terlalu jauh dari tujuan utama (Sahir, 2022).

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses awal dalam menganalisis data dengan cara menyederhanakan, menyeleksi, dan memfokuskan data mentah yang diperoleh dari lapangan agar lebih bermakna dan sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi dilakukan untuk membuang informasi yang tidak relevan serta menyoroti data yang dianggap penting, sehingga peneliti dapat lebih mudah melihat pola-pola dan hubungan antar kategori. Proses ini

dilakukan secara terus menerus sepanjang proses pengumpulan data berlangsung.

b. Penyajian Data

Setelah melalui proses reduksi, data disusun secara sistematis dan diklasifikasikan berdasarkan tema atau kategori yang sesuai dengan fokus kajian. Data yang ada kemudian dikelompokkan pada bagian masing-masing agar memudahkan dalam memahami keterkaitan antar informasi. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif, tabel, atau bagan naratif yang menggambarkan hasil pengamatan, wawancara, maupun dokumentasi. Data yang disajikan harus sesuai dengan informasi yang diperoleh dari catatan di lapangan dan mencerminkan realitas objek yang diteliti.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dari keseluruhan proses analisis data. Kesimpulan merupakan pernyataan sementara yang dapat berubah jika ditemukan data baru yang lebih relevan. Oleh karena itu, peneliti juga melakukan verifikasi, yaitu membandingkan dan mengecek kembali keabsahan data serta konsistensinya dengan teori atau konsep yang digunakan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga interpretatif, menggambarkan makna yang mendalam dari fenomena yang dikaji.

3.9 Teknik Keabsahan Data

Sebuah penelitian perlu diuji tingkat keabsahannya agar hasil yang diperoleh dapat dinyatakan valid serta mencerminkan kebenaran yang objektif. Dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan data mencakup beberapa aspek penting, yaitu uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas (Sugiyono, 2014). Proses pengujian dilakukan dengan memanfaatkan sumber atau cara lain di luar data utama, namun tetap memiliki keterkaitan yang jelas, seperti melalui kegiatan pengecekan maupun perbandingan terhadap data yang

telah diperoleh. Dalam penelitian ini, uji keabsahan data dilaksanakan melalui tiga bentuk pengujian utama sebagai berikut.

- a. Triangulasi sumber data merupakan upaya untuk memastikan kebenaran informasi tertentu dengan memeriksa data dari berbagai sumber dan metode. Proses ini dilakukan melalui wawancara, observasi, survei, serta telaah terhadap dokumen tertulis, arsip, catatan resmi, tulisan pribadi, maupun bukti visual seperti foto atau gambar. Dengan cara ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh dan menghindari bias dari satu sumber tunggal.
- b. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan informasi atau data yang diperoleh menggunakan metode yang berbeda. Tujuan dari triangulasi teknik adalah untuk menilai keabsahan data dan memastikan konsistensi temuan penelitian. Menurut Bachri (2010), pendekatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data terhadap objek atau fenomena yang sama, disertai dengan proses pengecekan ulang (cek dan recek) agar hasil yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipercaya.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung

4.1.1 Sejarah Singkat

Sejarah Singkat Berdirinya Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Bandar Lampung, menurut sejarahnya yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung merupakan salah satu instansi pemerintah yang berperan penting pada pemenuhan kebutuhan prasarana jalan dan jembatan dalam mendukung pembangunan dalam bidang ekonomi, perkembangan antar daerah yang seimbang, pemerataan hasil pembangunan social budaya dalam rangka pembangunan nasional berkelanjutan, saat ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung berada di Jl. ZA. Pagar Alam No. KM. 11, Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Surat keputusan Gubernur Provinsi Lampung pada tahun 1995 mengalami perubahan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor G/033/B.IV/HK/1989 pada tanggal 28 Januari 1989. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Lampung pada tahun 1995 mengalami perubahan struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung Dati 1 Lampung dengan Perda Nomor 06 tahun 1995 tanggal 27 Februari 1995. 7 Surat Keputusan Gubernur Lampung pada tahun 1996 mengalami perubahan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dengan Surat Keputusan Mendagri Nomor 061/35025/SJ pada tanggal 20 Desember 1996.

Pada tahun 1997 terjadi perubahan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dati I Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Dati I Lampung Nomor 09 Tahun 1997 tanggal 16 Juni 1997. Selanjutnya, pada tahun 2000 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung, sehingga terbentuk tiga dinas. Setelah itu, instansi ini berganti nama menjadi Dinas Bina Marga, Dinas Pengairan, serta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Instansi tersebut memiliki kewenangan dan tugas dalam menangani fasilitasi transportasi darat, khususnya yang berkaitan dengan jalan dan jembatan di wilayah provinsi maupun kabupaten. Kemudian, pada tahun 2007, Dinas Bina Marga, Dinas Pengairan dan Dinas Permukiman digabung menjadi satu lembaga, yaitu Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung. Selanjutnya, pada tahun 2009 Dinas Pekerjaan Umum kembali dipecah menjadi dua dinas, yaitu Dinas Bina Marga Provinsi Lampung serta Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung.

4.1.2 Visi dan Misi

1. Visi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
Membangun Sarana dan Prasarana Wilayah untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial.”
2. Misi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
 - a. Meningkatkan kualitas dan kemantapan infrastruktur jalan dan jembatan secara berkelanjutan di seluruh wilayah provinsi.
 - b. Mengoptimalkan sistem pengawasan dan pemeliharaan rutin melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di setiap wilayah kerja.

- c. Mengembangkan pembinaan jasa konstruksi agar tenaga kerja, badan usaha, dan penyedia jasa konstruksi memiliki kompetensi dan sertifikasi sesuai standar nasional.
- d. Meningkatkan daya dukung dan pemanfaatan teknologi konstruksi dalam negeri, termasuk peningkatan penggunaan material lokal dan efisiensi pekerjaan.
- e. Memperkuat tata kelola dan akuntabilitas pembangunan infrastruktur, dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan transparansi pengelolaan anggaran publik.

4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi memiliki tugas pokok dalam melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang kebinamargaan dan pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan lingkup kewenangannya. Selain itu, dinas ini juga melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Gubernur serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi Organisasi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar pedoman;
- b. Penyediaan dukungan/bantuan untuk kerja sama antar Kabupaten/Kota;
- c. Peningkatan prasarana/sarana wilayah yang terdiri atas jembatan dan jalan beserta simpul-simpul serta jalan bebas hambatan;
- d. Perizinan pembangunan jalan bebas hambatan lintas Kabupaten/Kota;
- e. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;

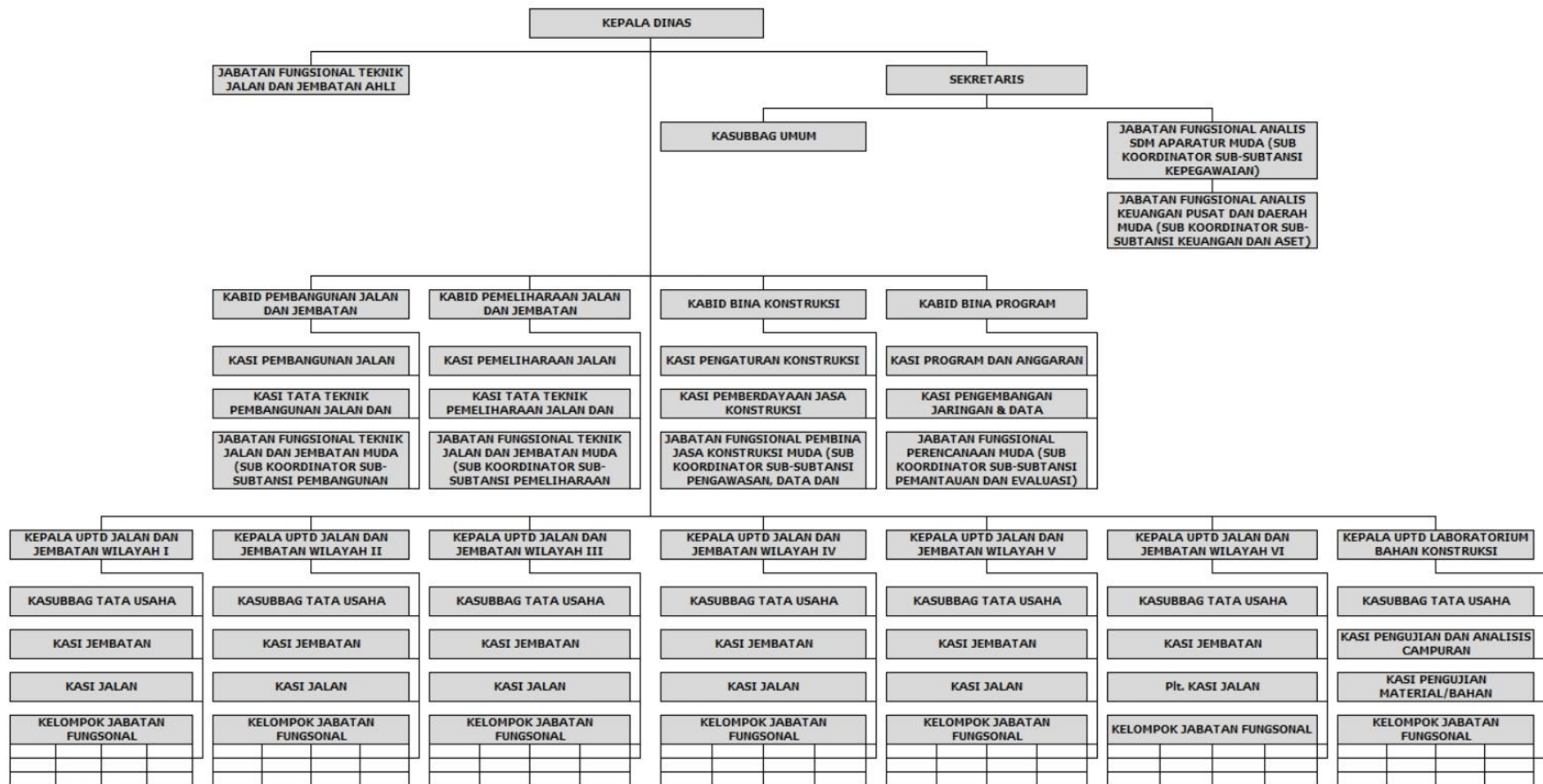
- f. Pengelolaan katatausahaan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

4.1.4 Susunan dan Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Kasubbag Umum
 - 2) Jabatan Fungsional Analis Sdm Aparatur Muda (Sub Koordinator SubSubtansi Kepegawaian)
 - 3) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda (Sub Koordinator Sub-Subtansi Keuangan dan Aset)
- c. Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Madya
- d. Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan, membawahi:
 - 1) Kasi Pembangunan Jalan
 - 2) Kasi Tata Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - 3) Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Muda (Sub Koordinator SubSubtansi Pembangunan Jembatan)
- e. Kabid Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, membawahi:
 - 1) Kasi Pemeliharaan Jalan
 - 2) Kasi Tata Teknik Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - 3) Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Muda (Sub Koordinator SubSubtansi Pemeliharaan Jembatan)
- f. Kabid Bina Konstruksi, membawahi:
 - 1) Kasi Pengaturan Konstruksi
 - 2) Kasi Pemberdayaan Jasa Konstruksi

- 3) Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Muda (Sub Koordinator SubSubtansi Pengawasan, Data dan Informasi)
- g. Kabid Bina Program, membawahi:
- 1) Kasi Program dan Anggaran
 - 2) Kasi Pengembangan Jaringan dan Data
 - 3) Jabatan Fungsional Perencanaan Muda (Sub Koordinator Sub-Subtansi Pemantauan Dan Evaluasi)
- h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah 1 s/d 6 dan UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi)
- i. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya



Gambar 4. Struktur Organisasi
Sumber: Renstra BMBK 2025-2026

4.2 Gambaran Umum Ruas-Ruas Jalan di Provinsi Lampung.

Infrastruktur jalan merupakan salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Tanpa adanya infrastruktur yang memadai dan berkualitas, pergerakan ekonomi tidak akan berjalan dengan optimal. Jalan sebagai bagian penting dari sistem transportasi darat memiliki fungsi strategis dalam memperlancar arus distribusi barang dan mobilitas masyarakat, sekaligus menjadi penghubung antarwilayah yang memungkinkan terjadinya pemerataan pembangunan. Menurut Despa (2021), jalan adalah prasarana transportasi darat yang mencakup seluruh bagiannya termasuk bangunan pelengkap serta perlengkapannya, yang digunakan untuk lalu lintas di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, atau di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Bab I Pasal I Ayat 4.

Jalan tidak hanya berperan sebagai sarana transportasi, tetapi juga sebagai urat nadi perekonomian yang memperkuat konektivitas antarwilayah dan mempercepat pertumbuhan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru. Peningkatan kegiatan pembangunan dan mobilitas penduduk menuntut pengelolaan jaringan jalan yang semakin baik, termasuk dalam perencanaan, pemeliharaan, serta pengembangan ruas-ruas jalan yang ada. Dalam lingkup wilayah provinsi, pengelolaan dan pengembangan ruas-ruas jalan memiliki arti strategis karena berfungsi menghubungkan antara pusat pemerintahan dan kawasan potensial ekonomi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/M/PRT/2012 serta Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019, terdapat beberapa klasifikasi jalan kolektor primer dan jalan strategis provinsi yang memiliki fungsi berbeda sesuai dengan perannya masing-masing.

1) Jalan Kolektor Primer 2 (JKP-2)

JKP-2 merupakan jalan kolektor primer yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota. Jalan ini berfungsi memperkuat konektivitas antara pusat pemerintahan provinsi dengan daerah-daerah administratif di bawahnya. Ruas-ruas jalan provinsi

yang termasuk dalam kategori ini biasanya menjadi jalur utama distribusi barang dan mobilitas penduduk dari dan menuju ibukota provinsi.

2) Jalan Kolektor Primer 3 (JKP-3)

JKP-3 adalah jaringan jalan yang berfungsi menghubungkan antaribukota kabupaten/kota. Jenis jalan ini berperan penting dalam mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah kabupaten, memperlancar arus logistik, serta meningkatkan keterhubungan antarwilayah di tingkat regional. Ruas-ruas jalan provinsi dengan kriteria JKP-3 umumnya menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi lintas kabupaten sehingga memperkuat integrasi wilayah.

3) Jalan Strategis Provinsi

Jalan strategis provinsi merupakan jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan potensi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan wilayah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006. Jalan ini memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Menghubungkan antarjalan nasional;
- b. Menghubungkan dengan provinsi lain;
- c. Menjadi akses menuju kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah;
- d. Menjadi akses menuju kawasan industri dan wilayah dengan potensi ekonomi tinggi;
- e. Menjadi akses menuju bandara dan pelabuhan.

Ruas-ruas jalan provinsi dengan kriteria di atas berfungsi sebagai tulang punggung transportasi regional yang mendukung pengembangan wilayah secara menyeluruh. Penataan dan pemeliharaan ruas-ruas tersebut menjadi prioritas dalam rencana pembangunan infrastruktur daerah, sebab keberadaannya berpengaruh langsung terhadap efisiensi transportasi, peningkatan daya saing ekonomi, dan percepatan pertumbuhan kawasan strategis provinsi.

Tabel 4. Ruas-Ruas Jalan Provinsi Lampung

NOMOR RUAS	NAMA RUAS	PANJANG (KM)	FUNGSI
001	Jalan Zainal Abidin Pagaralam (Kalianda)	2,890	JPS
002	Kalianda – Kunyir – Gayam	30,250	JPS
003	Gayam – Ketapang	11,297	JPS
004	Simpang Sidomulyo – Belambangan Sari	25,012	JKP-3
005	Belimbing Pagar – Jabung	9,308	JKP-3
006	Jabung – Simpang Labuhan Maringgai	22,962	JSP
007	Jalan Ahmad Yani (Metro)	2,770	JKP-3
008	Metro – Tanjung Kari	24,251	JKP-3
009	Nyampir – Tanjung Kari	7,876	JKP-3
010	Tanjung Kari – Pugung Raharjo	24,491	JKP-3
011	Pugung Raharjo – Jabung	26,558	JKP-3
012	Jalan Mayjen H.M. Ryacudu (Bandar Lampung)	3,315	JKP-2
013	Simpang Korpri – Sukadamai	20,468	JKP-2
014	Sukadamai – Kibang	4,419	JKP-2
015	Jalan Budi Utomo (Metro)	4,568	JKP-2
015	Jalan Soekarno Hatta (Metro)	2,297	JKP-2
016	Simpang Korpri – Purwotani	14,551	JSP
017	Jalan Veteran (Metro)	1,505	JSP
017	Jalan Patimura (Metro)	3,517	JSP
018	Metro – Kota Gajah	14,222	JSP
019	Kota Gajah – Simpang Randu	29,450	JSP
020	Simpang Randu – Seputih Surabaya	24,700	JSP
021	Seputih Surabaya – Sadewa	24,230	JSP
022	Bandar Jaya – Simpang Mandala	37,016	JSP
023	Gunung Sugih – Kota Gajah	13,984	JKP-3
024	Kota Gajah – Gedong Dalem	15,065	JKP-3
025	Kalirjo – Bangunrejo	14,086	JKP-3
026	Bangunrejo – Wates	22,212	JKP-3
027	Wates – Metro	12,415	JKP-3
028	Jalan Brigjen Katamso (Metro)	1,191	JKP-3
029	Gunung Sugih – Padang Ratu	30,500	JKP-3
030	Padang Ratu – Pekurun Udik	24,796	JKP-3
031	Pekurun Udik – Aji Kagungan	12,560	JKP-3
032	Padangratu – Kalirejo	22,603	JKP-3
033	Kalirejo – Pringsewu	16,392	JKP-3
034	Pringdewu – Pardasuka	18,797	JKP-3
035	Pardasuka – Sukamara	5,058	JKP-3
036	Sukamara – Kuripan	21,777	JKP-3
037	Branti Gedong – Gedong Tataan	24,124	JKP-3
038	Gedong Tataan – Kedondong	16,666	JKP-3

NOMOR RUAS	NAMA RUAS	PANJANG (KM)	FUNGSI
039	Kedondong – Pardasuka	11,092	JKP-3
040	Padang Cermin Kedondong	29,671	JSP
041	Jalan Tenggiri (Bandar Lampung)	0,191	JKP-2
041	Jalan RE Martadinata (Bandar Lampung)	5,873	JKP-2
042	Lempasing – Padang Cermin	29,157	JKP-2
043	Padang Cermin – Simpang Teluk Kiluan	31,732	JKP-2
044	Simpang Teluk Kiluan – Simpang Umbar	25,157	JKP-2
045	Simpang Umbar – Putih Doh	23,830	JKP-2
046	Putih Doh – Kuripan	11,736	JKP-2
047	Kuripan – Simpang Kotaagung	21,468	JKP-2
048	Pekon Balak – Suoh	33,628	JKP-2
049	Suoh – Simpang Blok 9	30,447	JKP-2
050	Simpang Blok 9 – Sanggi	20,873	JKP-3
051	Jalan Raden Intan (Liwa)	5,179	JSP
052	Liwa – Batas Sumatera Selatan	19,109	JSP
053	Jalan Adam Malik (Krui)	1,812	JSP
054	Krui – Pekon Serai	1,810	JSP
055	Kotajawa – Kampung Baru	8,374	JSP
056	Talang Padang – Ngarip	35,862	JSP
057	Ngarip – Ulu Semong	21,500	JSP
058	Ulu Semong – Simpang Trimulyo	9,660	JSP
059	Simpang Trimulyo – Bungin – Simpang Tugu Sari	24,574	JSP
060	Tekad – Batutegi	4,800	JSP
061	Taman Siswa – Raja Asli	3,100	JKP-3
062	Kotabumi – Bandar Abung	19,725	JKP-3
063	Bandar Abung – Bandar Saki	7,957	JSP
064	Bandar Sakti – Simpang Daya Murni	10,099	JSP
065	Simpang Daya Murni – Gunung Batin	12,389	JSP
066	Bandar Abung – Simpang Tujok	10,807	JKP-3
067	Negara Ratu – Simpang Tujok	35,698	JSP
068	Simpang Tujok – Panaragan Jaya	25,813	JKP-3
069	Panaragan Jaya – Simpang Panaragan	4,104	JKP-3
070	Kotabumi – Ketapang	17,578	JKP-3
071	Ketapang – Negara Ratu	12,336	JPS
072	Negara Ratu – Gunung Betuah	21,066	JSP
073	Gunung Betuah – Gunung Labuan	12,420	JSP
074	Simpang Empat – Kasui	18,050	JSP
075	Kasui – Air Ringkih (Batas Sumsel)	26,295	JSP
076	Simpang Empat – Blambangan Umpu	11,063	JKP-3
077	Blambangan Umpu – Sri Rejeki	20,421	JKP-3
078	Sri Rejeki – Pakuan Ratu	18,660	JKP-3

NOMOR RUAS	NAMA RUAS	PANJANG (KM)	FUNGSI
079	Pakuan Ratu – Bumiharjo	25,595	JSP
080	Bumiharjo – Simpang Way Tuba	30,614	JSP
081	Negara Ratu – Simpang Soponyoo	15,501	JKP-3
082	Simpang Soponyono – Serupa Indah	10,858	JKP-3
083	Serupa Indah – Pakuan Ratu	16,423	JKP-3
084	Serupa Indah – Tajab	11,200	JKP-3
085	Jalan Raya Gunung Sakti (Menggala)	1,865	JKP-3
086	Bujung Kenuk – Penumangan	12,432	JKP-3
087	Penumangan – Tegal Mukti	15,839	JKP-3
088	Tegal Mukti – Tajab	36,000	JSP
089	Tjab – Adijaya	23,600	JSP
090	Adijaya – Tulung Randu	38,130	JSP
091	Penumangan – Unit VI	23,562	JSP
092	Simpang Unit VII – Gedong Aji	22,050	JSP

Sumber: Dinas BMBK Provinsi Lampung

Melihat keseluruhan jaringan ruas jalan provinsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaannya memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mempercepat arus pertumbuhan ekonomi di seluruh kawasan Provinsi Lampung. Pembangunan dan pemeliharaan jalan bukan hanya tentang penyediaan infrastruktur fisik, tetapi juga tentang menghadirkan kemudahan, memperpendek jarak sosial-ekonomi, dan membuka ruang baru bagi kemajuan masyarakat di setiap wilayah.

Dengan penataan yang terencana, pengelolaan yang berkelanjutan, dan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas jaringan jalan, diharapkan seluruh ruas yang ada dapat berfungsi secara optimal sebagai tulang punggung transportasi regional. Setiap kilometer jalan yang dibangun mencerminkan langkah nyata menuju pemerataan pembangunan, memperkuat daya saing provinsi, serta menjadi simbol kemajuan bersama yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pengawasan yang diterapkan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pekerjaan jalan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2023 sebagai pedoman utama. Strategi ini dijalankan melalui dua bentuk pendekatan utama, yaitu pengawasan langsung (*direct supervision*) dan pengawasan tidak langsung (*indirect supervision*). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan strategi pengawasan langsung (*direct supervision*):
 - 1) Pemantauan lapangan secara berkala di Kota Metro dilakukan oleh konsultan supervisi bersama tim pengawas dinas dan UPTD untuk memastikan pekerjaan konstruksi jalan sesuai dengan rencana teknis dan standar mutu. Pengawasan ini dinilai cukup rutin dan berdampak positif terhadap kualitas pekerjaan. Namun, pengawasan masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam percepatan tindak lanjut temuan di lapangan serta perhatian terhadap perbaikan sistem drainase yang berpengaruh terhadap ketahanan jalan di wilayah perkotaan.
 - 2) Pemeriksaan kesesuaian hasil pekerjaan dilakukan melalui tahapan evaluasi teknis, melibatkan konsultan supervisi dan tim pengawas dinas. Pekerjaan hanya dapat diterima setelah dinyatakan sesuai dengan spesifikasi dan kontrak melalui tahapan *Provisional Hand Over* (PHO) Langkah ini menunjukkan bahwa BMBK Provinsi Lampung telah menerapkan mekanisme kontrol mutu yang ketat

dalam memastikan setiap hasil pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan

- b. Berdasarkan indikator pengawasan tidak langsung (*indirect supervision*):
 - 1) Pemeriksaan administrasi kontrak dan dokumen pelaksanaan dilakukan secara sistematis untuk memastikan seluruh Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK), konsultan, dan Badan Usaha Rantai Pasok (BURP), PPK, pihak UPTD memenuhi ketentuan administratif sesuai Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2023. Pelaksanaan pengawasan administrasi ini telah berjalan dengan baik dan mulai diterapkan secara terstruktur di lingkungan BMBK Provinsi Lampung, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar BUJK dan BURP masih belum sepenuhnya memahami ketentuan serta mekanisme pengawasan administrasi yang diberlakukan. Akibatnya, masih terjadi keterlambatan dalam pelaporan serta ketidaklengkapan dokumen administrasi yang memerlukan pembinaan dan pendampingan lebih lanjut dari pihak dinas.
 - 2) Tindak lanjut atas temuan ketidaksesuaian pekerjaan dilakukan melalui mekanisme pemberian teguran, perintah perbaikan (*rework*), hingga penerapan sanksi administratif apabila koreksi tidak dilakukan. Penegakan ini dilakukan secara berjenjang oleh tim pengawas, PPK, dan Bidang Bina Konstruksi untuk memastikan seluruh pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak.

Berdasarkan kedua dimensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa rencana strategi pengawasan yang disusun oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung telah terlaksana dengan arah yang jelas dan selaras dengan tujuan peningkatan mutu konstruksi jalan, namun masih memerlukan tindak lanjut terhadap berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan, seperti koordinasi kepada para objek pengawasan yang perlu diperkuat, serta tingkat pemahaman BUJK dan BURP yang masih rendah terhadap mekanisme pengawasan administrasi dan teknis. Dengan demikian, strategi pengawasan yang diterapkan telah menunjukkan hasil positif dalam menjaga tertib usaha,

tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi, namun perlu penguatan pada aspek pembinaan dan implementasi agar pelaksanaannya lebih efektif dan berkelanjutan.

6.2 Saran

a. Untuk Dinas BMBK Provinsi Lampung

Dinas BMBK diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan strategi pengawasan dengan melakukan pembinaan berkelanjutan kepada seluruh pihak yang terlibat, khususnya BUJK, konsultan, dan BURP agar lebih memahami mekanisme pengawasan sesuai Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2023. Dinas juga perlu meningkatkan koordinasi antarbidang serta mengoptimalkan penggunaan sistem monitoring berbasis digital untuk pelaporan dan evaluasi proyek guna mendukung transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, penting bagi Dinas untuk menindaklanjuti masukan masyarakat dengan memperkuat pengawasan pada aspek pendukung lain dalam menjaga kualitas jalan serta percepatan tindak lanjut hasil temuan di lapangan agar kualitas jalan dapat terjaga dengan lebih baik dan berkelanjutan.

b. Untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian berikutnya diharapkan dapat mengkaji efektivitas penerapan strategi pengawasan di lapangan, termasuk hambatan dan faktor pendukung dari sisi teknis maupun administratif. Selain itu, studi lanjutan dapat memperluas fokus ke tingkat kabupaten/kota maupun antarprovinsi untuk memperoleh perbandingan yang lebih komprehensif terkait implementasi kebijakan pengawasan konstruksi di berbagai daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, N., Mulyadi, A., & Amirulloh, M. R. 2025. Peran Dinas Pekerjaan Umum dalam Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur Jalan di Ruas Jalan Pangleseran-Cibatu Kabupaten Sukabumi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 6606-6617.
- Agustino, L. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, S. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Arby Pratama. 2024. *3 Bulan Diperbaiki Jalan Provinsi di Metro Utara Rusak Lagi, Ini Kata BMBK Lampung*. Kupastuntas.co. Di Akses Pada 14 Juli 2025.
- Atmosudirjo, Prajudi. 1982. *Beberapa Pandangan Umum tentang Pengambilan Keputusan*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bachri, B. S. 2010. Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(1), 46–62.
- Bappenas. 2020. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*.
- Bennett, A., & Elman, C. 2006. *Q Ualitative R Esearch: Recent Developments in Case Study Methods*. 2001.
- Citriadin, Y. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Dasar*. Mataram: Sanabil.
- Cay, S. 2023. *Lingkungan Organisasi*
- Dewi, D. S. K. 2022. *Buku Ajar Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi*.
- Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung. 2024. *Laporan Capaian Kinerja Infrastruktur Jalan Provinsi Lampung Tahun 2018–2024*. <http://binamargalampungprov.go.id>

- Despa, D. 2021. Sistem Informasi Geografis Pemetaan Kondisi Jalan di Provinsi Lampung. *Jurnal Tekno Kompak*, 15(1), 34–40.
- Engkus, E. 2022. *Kebijakan Publik: Konsep, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi serta Pembaruan*
- Fatimah, F., Sudarmi, S., & Yusuf, M. 2021. Pengawasan Infrastruktur Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Pupr) Di Kabupaten Bone. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(4), 1345-1356
- Hamel dan Prahalad. 2001. *Kompetisi Masa Depan; Strategi Strategi Terobosan Untuk Merebut Kendali atas Industri Anda dan Menciptakan Pasar Masa Depan*. Jakarta: Binarupa
- Hanum, F. 2023. Efektivitas Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Klabang Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso. *Acton*, 19(1), 42-56.
- Herdiana, D. 2018. Sosialisasi kebijakan publik: Pengertian dan konsep dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3), 13-26.
- Iqbal, M., Aulia, R., & Ashari, M. R. 2020. Implementasi Pengawasan Legislatif (Pengawasan Terhadap Kebijakan Infrastruktur Jalan Provinsi Tahun 2020).
- Indonesia Corruption Watch. 2025. *Laporan hasil pemantauan tren korupsi tahun 2024*. Divisi Hukum dan Investigasi, Indonesia Corruption Watch.
- Juarsyah, M., Despa, D., & Septiana, T. 2022. Pengawasan Pekerjaan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Kotabumi–Ketapang (Link. 070) di Kabupaten Lampung Utara. *Jurnal Rekayasa Lampung (JRL)*, 1(3).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.web.id/strategi>
- Kementerian PUPR. 2023. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi*.
- Karso. 2022. *Good Governance dan Reformasi Birokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Khairudin, Soewito, Aminah. 2021. *Potret Kepercayaan Publik, Good Governance Dan E-Government Di Indonesia*. Cv. Amerta Media.
- Khalil, M. 2023. *Peran Pembangunan Infrastruktur dalam Pertumbuhan Ekonomi dan Reduksi Kesenjangan Regional: Analisis Fenomena dan Perspektif Teori Modernisasi*.

- Kusumadmo. 2013. *Manajemen Strategik Pengetahuan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Latib, A., & Khoiri, A. 2022. Strategi Pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Jember. *Jurnal Paradigma*, 62–68
- Lensamonitor.com. (2025, 12 Desember). Baru seumur jagung, aspal sudah hancur! Kontraktor bermain ‘nakal’ diduga kualitas pekerjaan ecek-ecek. Retrieved from <https://www.lensamonitor.com/2025/12/baru-seumur-jagung-aspal-sudah-hancur.html>
- Manullang, M. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Marrus, S. K. 2001. *Strategic Management In Action*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Materu, M. A., Wijayanto, H., Prasetyo, S., Ahmad, M., & Lukiyana, L. 2024. Strategi Pengawasan Bawaslu Dalam Pemilu 2024. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 10(2), 142-155.
- Mawaza, J. F., & Khalil, A. 2020. Masalah Sosial dan Kebijakan Publik di Indonesia (Studi Kasus UU ITE No. 19 Tahun 2016). *Journal of Governance Innovation*, 2(1), 22–31.
- Mulgan, G. 2009. *The Art of Public Strategy: Mobilizing Power and Knowledge for the Common Good*. Oxford: Oxford University Press.
- Nasution, A. F. 2023. *Metode penelitian kualitatif*.
- Nasution, K., Nasution, M.A., Rustiyana, R., & Rachim, A. 2025. *Kebijakan Publik dalam Perspektif Manajemen Modern: Inovasi, Tata Kelola, dan Akuntabilitas*. Yogyakarta: Deepublish
- Nazir, M. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Novi, V. 2021. *Strategi Adalah: Pengertian, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya*. Gramedia Blog.
- Noprita, M. 2021. Kajian Fungsi dan Status Jalan Provinsi Lampung. In Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) (Vol. 1, No. 1).
- Nurhidayat, I. 2023. Prinsip-prinsip good governance di Indonesia. *Journal Education and Government Wiyata*, 1(1), 40-52.
- Nurhasani, I. 2023. Strategi Pengawasan Pimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Kantor Pangulu Nagori Siantar Estate Kabupaten Simalungun.

KESKAP: Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik, 2(1), 69-80.

Patton, Michael Quinn. 1980. *Qualitative Evaluation Method*, Beverly Hills, London: Sage Publications.

Putra, D. P., Santoso, B., & Hidayat, R. 2022. Regional Road Infrastructure and Economic Accessibility in Developing Provinces. *Journal of Infrastructure Policy and Development*, 6(1), 45–62.

Quinn, J. B. 1999. *Strategic Management: Logic and Action*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Ramdhani, M. A. 2017. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(1), 1–12.

Sari, N., Lie, D., Efendi, E., & Inrawan, A. 2015. Pengaruh pengawasan terhadap kinerja pegawai pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang pematangsiantar. *Maker: Jurnal Manajemen*, 1(1), 49-55.

Simbolon. 2004. *Dasar- Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Safitry, N., & Rahmatullah, A. F. 2024. Strategi Pengawasan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam Menyikapi Tantangan Pilkada Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Transformative*, 10(2), 237-271.

Sahir, S. H. 2021. *Metodologi penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.

Salusu, J. 2006. *Pengambilan Keputusan Stratejik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka

Sinaga, A. T. P. 2013. Strategi Peningkatan Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pemerintah Daerah Pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi.

Siti, M. 2022. *Buku Kebijakan Publik Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik*.

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sukma, I. B., & Kabdiyono, E. A. 2025. Analisis Dampak Kerusakan Jalan Terhadap Pengguna Jalan Dan Lingkungan Di Jalan Di Panjairan Jakarta Timur. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(4).

Supriana, T. 2018. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sururama, R., & Amalia, R. 2020. *Pengawasan pemerintahan*.

Usman, C., Liando, D., & Rumawas, W. 2016. Pengaruh lingkungan *internal* dan eksternal organisasi terhadap kinerja pegawai (studi pada pegawai di kantor otoritas bandar udara wilayah VIII manado). *Jurnal Ilmiah Society*, 1(21), 19-33.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

.